

**PERANAN UNITED STATES – CAMBODIA CULTURAL PROPERTY
AGREEMENTDALAM MENGATASI TRAFFICKING IN CULTURAL
PROPERTY DI KAMBOJA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin*

Oleh:

ANDI SUFRIANA NUR UTAMI

E 131 122 64

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERANAN *UNITED STATES – CAMBODIA CULTURAL
PROPERTY AGREEMENT* DALAM MENGATASI
TRAFFICKING IN CULTURAL PROPERTY DI KAMBOJA

N A M A : ANDI SUFRIANA NUR UTAMI

N I M : E 131 12 264

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 2 Desember 2016

Mengetahui :

Pembimbing I,

H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 19620102 199002 1 003

Pembimbing II,

Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 19760818 200501 1 003

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 19620102 199002 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERANAN *UNITED STATES – CAMBODIA CULTURAL
PROPERTY AGREEMENT* DALAM MENGATASI
TRAFFICKING IN CULTURAL PROPERTY DI KAMBOJA

N A M A : ANDI SUFRIANA NUR UTAMI

N I M : E 131 12 264

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at,
25 November 2016

TIM EVALUASI

Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Burhanuddin, S.IP, M.Si

ABSTRAK

ANDI SUFRIANA NUR UTAMI, E13112264, *Peranan United States – Cambodia cultural property agreement dalam mengatasi trafficking in cultural property di Kamboja*, Dibimbing oleh H. Darwis MA, Ph.D selaku pembimbing I dan Agussalim, S.IP, MIRAP selaku pembimbing II, departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik, Universitas Hassanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kepentingan nasional Kamboja dan Amerika Serikat dalam kerjasama United States – Cambodia cultural property agreement dan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan United States – Cambodia cultural property agreement dalam mengatasi trafficking in cultural property di Kamboja. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan yang digunakan penulis adalah studi pustaka. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, dan untuk pembahasan masalah penulis menggunakan teknik penulisan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Kamboja memiliki kepentingan nasional yang berbeda, setiap negara memiliki tujuan nasional yang sesuai dengan kebutuhan dalam negerinya. Kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Kamboja dalam usaha melindungi warisan budaya mencakup aspek Politik dan keamanan, Ekonomi dan pembangunan serta Budaya dan pendidikan dan kerja sama ini telah memberikan hasil dengan dikembalikannya beberapa benda budaya yang dengan ilegal diselundupkan keluar dari wilayah kamboja.

Kata kunci: Transnational Crime, Cultural Property Agreement, Amerika Serikat, Kamboja.

ABSTRACT

ANDI SUFRIANA NUR UTAMI, E13112264, *Peranan United States – Cambodia cultural property agreement dalam mengatasi trafficking in cultural property di Kamboja*, under the guidance of H. Darwis MA, Ph.D as the first advisor and Agussalim, S.IP, MIRAP as the second Advisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin.

This study aims to identify and explain the national interests of Cambodia and the United States in cooperation United States - Cambodia cultural property agreement and to determine the form of the implementation of the United States - Cambodia agreement dalam cultural property in addressing trafficking in cultural property in Cambodia. Type of research that the author uses to achieve the objective is analytical descriptive research. Data collection techniques used by the author is library research. As for analyzing the data, the author uses qualitative analysis techniques. This study shows that that the United States and Cambodia have different national interests, each country has a national objective in accordance with its domestic needs. Cooperation is carried out by the United States and Cambodia in an effort to protect the cultural heritage includes aspects of politics and security, economy and development, and culture and education and this cooperation has produced results with dikembalkannya some cultural objects were illegally smuggled out of the territory of Cambodia.

Key Word: Transnational Crime, Cultural Property Agreement, United States, Cambodia

KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan Bismillahirrahmanirahim. Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai setelah mengalami proses yang cukup panjang. Untuk itu puji syukur penulis panjatkan sebesarnya dan seluasnya kepada Allah SWT. Karena atas berkah, rahmat dan karunianya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul *“Peranan United States – Cambodia cultural property agreement dalam mengatasi trafficking in cultural property di Kamboja”*

Proses pengerjaan skripsi yang panjang ini akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dukungan fisik dan moril dari banyak pihak. Dan untuk kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih sebesarnya kepada kedua pembimbing yang menggiring penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Kepada **Pak Darwis**, terima kasih untuk semua saran dan masukannya. Kepada **Pak Agussalim**, terima kasih untuk semua bimbingan, saran-saran, dan perhatiannya. Penulis juga menghaturkan terima kasih setulusnya kepada :

1. Seluruh jajaran pendidik jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanuddin. Kepada **Prof. Salusu, Prof. Mappa, Pak Patrice Lumumba, Pak Darwis, Pak Muhammad Nasir Badu, Pak Ishak Rahman, Pak Husein Abdullah, Pak Aspianoor, Pak Burhanuddin, Pak Gego, Pak Aswin, Ibu Puspa, Ibu Isda, dan Ibu Seniwati**. Terima kasih untuk semua bimbingan, ilmu pengetahuan dan perhatian bapak dan ibu semua selama empat tahun ini.
2. Staf akademik Departemen Hubungan Internasional, Fisip, Universitas Hasanuddin. Terkhusus untuk **Bunda dan Kak Rahma** terima kasih atas jasa dan bantuannya dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
3. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, walaupun beliau tidak lagi ada untuk menemani penulis selama penelitian ini berlangsung tetapi semangat paling besar untuk menyelesaikan skripsi yang penulis terima, datang dari kedua orang terhebat yang ada di hidup penulis. *It hurts to think that both of them is not here anymore, losing*

them is a pain that can't be describe in words. Even after these years, when i think about them its still heartache that no one can heal. I need them but Allah SWT love them so much. Tidak banyak lagi hal yang bisa penulis lakukan untuk mereka selain berdoa dan berusaha untuk hidup bahagia.

4. Dan juga untuk keluarga penulis, Kakak **Andi Muthmainnah S.farm, Apt.** dan Kakak **Andi Saefuddin Muslimin S.AB**, terima kasih telah menjadi orang yang paling bisa penulis andalkan. Dengan menjadi panutan serta kakak yang hebat merupakan anugerah yang penulis terima, *the time we spent together is a bless, even sometimes we argued but you need to know that i love both of you, i will always do.*
5. Untuk pung mami **Hj Andi Nurhiyari** dan pung bapak **H. Andi Jamaro Dulung M.si**, terima kasih untuk semua doa, dorongan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis, *even before i lose my parents they always treat me like a daughter, and until now they still being on my side. I will try my best to make you proud.* Meskipun ucapan terima kasih mungkin tak akan setara dengan apa yang telah kalian berikan. Semoga Allah selalu melindungi kalian berdua. *and of course thanks to my another brother Pung Agam, Pung Iyan, Andi Ais dan Andi Ocan, one again thankyou for let me be your sister.*
6. Untuk Widya, Cong, Macci dan Nining, *its about who came and never left you side, thankyou so much. Since 2009.* Untuk Mia Mahdinal Dan Irmayanti Sultan yang lebih duluan sarjana, *thankyou for always be my sister from another mother.*
7. Terimakasih untuk Elsyia, yumna, eki, amel, fifi, olvi dan irene. *I spent a lot of time in college with all of you lovess, my future bridesmaids.* Tika & intan teman nonton dan cerita *absurd* paling seru sayangki, terus ada tilah & dewe yang selalu jd *happyvirus*.
8. Untuk teman teman yudisium periode desember 2016 HI – UH Nita, Yuli, Risna, Lala, Asti, Maldini, dan Fahrhan. *you guys special because we share that graduation moment together.*
9. Teria Kasih teman angkatan **HI - 2012**, Bayu, Akmal, Gufron, Rial, Sirton, Amma, Dian, Ai, Vivi, Ama, Ahyan, Malik, Aldi, Ilham, Arnes, Ojan, Afif,

Ino, Hasan, Bahri, Malik, Nizar, Kharji, Tyo, Fitrah, Syarif, Bill, Topan, Dimas, Ayu, Ninik, Umi, Siska, Winda, Leli, Nasly, Dela, Gadis, Mercy, Frischa, Ajeng, dan Ros Sukses yah teman-teman dan tetap semangat.

10. Untuk teman teman peserta KKN INTERNASIONAL gel 90,`terima kasih karena membuat knn terasa begitu menyenangkan bahkan dengan jadwal yang padat.*its been a year and its gonna be a great memories.*
11. Dan terakhir terima kasih banyak kepada **HIMAH** FISIP UNHAS yang telah banyak mengajarkan hal berguna dan bermanfaat, mempertemukan dengan orang orang hebat. Maaf penulis ucapkan karena masih sedikit yang bisa diberikan untuk himpunan ini padahal terlalu banyak hal yang didapatkan.
wherever we go, Himahi will always be our home.

Akhirnya penulis persembahkan skripsi ini untuk semua pihak.Semoga skripsi ini bermanfaat dan diberkahi Allah SWT.Sekali lagi terima kasih.

Makassar, Desember 2016

Andi Sufriana Nur Utami

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TUJUAN PUSTAKA	16
A. Transnational crime	16
B. Kepentingan Nasional	21
C. Hubungan bilateral	27
BAB III <i>UNITED STATES – CAMBODIA CULTURAL PROPERTY AGREEMENT</i> DAN PENANGANAN <i>TRAFFICKING IN CULTURAL PROPERTY</i> DI KAMBOJA.....	34
A. Kejahatan terhadap warisan budaya	34
B. Warisan budaya di Negara Kamboja.....	37
C. <i>Trafficking In Cultural Property</i> di Kamboja.....	44
D. <i>United States – Cambodia Cultural Property Agreement</i>	47
BAB IV PERANAN <i>UNITED STATES – CAMBODIA CULTURAL PROPERTY</i> <i>AGREEMENT</i> DALAM MENGATASI <i>TRAFFICKING IN CULTURAL</i> <i>PROPERTY</i> DI KAMBOJA	50
A. Kepentingan nasional Amerika Serikat dan Kamboja dalam kerja sama <i>United</i> <i>States – Cambodia Cultural Property Agreement</i>	50

B. Bentuk pelaksanaan dari <i>United States – Cambodia Cultural Property Agreement</i>	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Red List of Cambodian Antiquities at Risk</i>	45
Tabel 3 Bentuk Kerjasama Amerika Serikat – Kamboja.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	76
Gambar 3.2	77
Gambar 3.3	78
Gambar 3.4	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya merupakan simbol dan identitas masyarakat dalam suatu negara. Setiap Negara memiliki budaya yang berbeda sehingga ada banyak karakteristik budaya di berbagai belahan dunia. Budaya sebagai identitas dalam suatu negara dapat dijelaskan dengan melihat kebudayaan suatu bangsa merupakan cerminan perjalanan bangsa itu sendiri, begitu banyak kelebihan satu negara yang tidak dimiliki oleh Negara lain. Budaya mengacu pada pola aktivitas manusia yang direpresentasikan melalui seni, sastra, adat dan tradisi dari suatu masyarakat.

Kebudayaan yang ada dalam suatu negara selain menjadi hasil cipta karya seni dan karya intelektual oleh masyarakat, budaya juga menjadi alat atau simbol politik khas suatu bangsa. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni¹. Hal ini menjadikan *cultural properties* memiliki ikatan yang sangat kuat ke dalam masyarakat melalui nilai sosial dan budaya maupun politik sehingga sangat perlu

¹Chris Jenks, 2013. *Culture Studi Kebudayaan*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta hal 5-6

untuk dipelihara, dijaga serta dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Kekayaan budaya atau juga yang dikenal dengan sebutan *cultural heritage* merupakan hasil cipta dan karya yang diberikan oleh leluhur secara turun-temurun sebagai warisan. *Cultural heritage* selanjutnya dibagi menjadi dua jenis yaitu *intangible* dan *tangible*².

Intangible cultural heritage merupakan kekayaan budaya yang tidak memiliki wujud seperti bahasa, ritual, lagu, tarian tradisional, masakan khas, dan keahlian khusus seperti membuat obat tradisional. *Tangible cultural heritage* merupakan kekayaan budaya yang berwujud benda konkrit yang dapat dilihat ataupun disentuh seperti situs sejarah dalam bentuk bangunan, candi, patung baik itu berwujud manusia ataupun binatang serta alat musik tradisional.

Sejak Perang Dunia II masyarakat internasional makin menyadari pentingnya untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya. Kepedulian dunia ditandai dengan dicetuskannya “*Cultural Property Of Mankind*” dalam Konvensi *Hague* 1954³. Dengan ini perhatian masyarakat internasional pada kekayaan budaya dunia pun meningkat. Segala properti budaya yang mempunyai nilai nilaidapat disebut sebagai kekayaan budaya dunia dan menjadi tanggung jawab penjagaan dan perlindungan seluruh

²*Tangible Cultural Heritage*<http://www.unesco.org/new/en/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/> diakses pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.

³UNESCO *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954* dalam http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html diakses pada hari Rabu 16 Maret 2016 pada pukul 17.40 WITA.

masyarakat dunia. Seiring dengan berkembangnya zaman maka kejahatan terhadap benda seni budaya dikategorikan kedalam *transnational crime*.⁴

Transnational crime merupakan kejahatan yang mempunyai dampak melewati batas teritorial suatu Negara, kejahatan transnasional dapat dilakukan oleh individual atau kelompok secara terorganisir. Batasan definisi dan klasifikasi dari kejahatan internasional menunjukkan adanya unsur lintas batas atau menyangkut kepentingan bukan hanya domestik dari suatu negara, tetapi juga kepentingan negara lain. Adapun *trafficking in cultural property* atau kejahatan terhadap benda seni budaya merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam 18 jenis kejahatan transnasional oleh PBB. Kejahatan ini merupakan bentuk dari kegiatan pencurian atau penyelundupan benda-benda seni dari satu negara ke Negara lainnya⁵.

Perkembangan era globalisasi memiliki peran dalam munculnya kejahatan transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara membuat kejahatan transnasional meningkat secara dramatis. Hal yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional ialah adanya barang-barang tertentu yang tersedia di beberapa negara dan tidak tersedia pada negara lain, atau adanya perbedaan harga membuat penyelundupan benda-benda budaya menjadi sangat menguntungkan. Dengan alasan tersebut dan dengan

⁴Katherine Teilmann and Malcolm Klein, 1980. *Handbook of Criminal Justice Evaluation*. Beverly Hills London. Hal 27

⁵United Nations Office on Drugs and Crime, *Emerging Crimes : Organized Crime*
<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/emerging-crimes.html> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada pukul 16.30 WITA

adanyapeluang transportasi yang meningkat maka hal ini dapat membuat arus perdagangan kejahatan transnasional lebih mudah. Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang⁶.

United Nation, Scientific, and Cultural Organization atau lebih dikenal dengan sebutan UNESCO merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tugas khusus untuk melindungi warisan budaya dalam pengawasan upaya internasional untuk melindungi kreatifitas dan keragaman di seluruh dunia. Amerika Serikat merupakan salah satu dari 115 negara anggota yang berpartisipasi dalam pembuatan konvesi yang diadopsi oleh UNESCO pada tanggal 14 November 1970 mengenai *protection* terhadap benda-benda budaya yang bunyinya “*Means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property*”.

Adanya konvensi ini membuat negara-negara anggota bekerja sama untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti pencurian dan penyelundupan benda-benda arkeologi dan etnologis budaya secara signifikan. Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu anggota yang sangat berperan aktif karena negara ini menjadi salah satu negara tujuan benda-benda budaya yang di dapatkan secara illegal. Pada tahun 1972, Senat Amerika Serikat

⁶*Meeting the Challenge of Transnational Crime : Case Crime of Cultural Art Property*
<https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/jr000244b.pdf> diakses pada hari Rabu 16 Maret 2016 pada pukul 17.00 WITA.

memberikan persetujuan penuh terhadap Konvensi UNESCO 1970. Namun, Konvensi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum yang berlaku di Amerika Serikat, maka undang-undang khusus sangat diperlukan agar memungkinkan Amerika Serikat untuk menerapkannya. Pada tahun 1982, Kongres meloloskan *Convention on Cultural Property Implementation Act* dan Presiden Ronald Reagan menandatangani dan menjadikannya undang-undang pada bulan Januari 1983⁷.

Secara singkat, Amerika yang menjadi salah satu anggota Konvensi berjanji untuk berusaha dengan maksimal mengurangi adanya kegiatan impor kekayaan budaya yang diperoleh melalui hasil pencurian dari museum atau monumen publik agama negara lain. Konvensi ini memungkinkan setiap negara yang memiliki warisan budaya yang mengalami kasus penjarahan untuk meminta bantuan dari negara lain bantuan tersebut bisa berupa melakukan langkah-langkah seperti kontrol ekspor, impor, dan perdagangan internasional terhadap benda-benda budaya.

Kamboja yang merupakan bagian dari masyarakat internasional, menunjukkan kecintaannya terhadap warisan budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari bendera negara ini, masyarakat Kamboja sangat menghormati warisan budaya mereka. Agama menjadi sumber inspirasi utama bagi kebudayaan di Negara ini. Hampir selama dua milenium, Kamboja

⁷*Process and Purpose*. <http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/process-and-purpose> diakses pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 17.48 WITA.

mengembangkan kepercayaan *Khmer* yang merupakan gabungan antara kepercayaan Animisme, Agama Buddha, dan Agama Hindu. Dengan melihat bagaimana masyarakat kamboja menghormati dan menjaga kebudayaannya, maka dalam hal ini pemerintah Kamboja juga memberikan perhatian lebih. Dapat dilihat bagaimana pemerintah Kamboja berperan ketika terjadi konflik dengan Thailand pada konflik candi *Preah Vihear* dan banyaknya kasus *trafficking* pada benda-benda kebudayaan di Kamboja⁸.

Pada awal tahun 1970, Kamboja sedang mengalami perang sipil dan terjadinya kasus pembunuhan massal di beberapa tempat dan membuat negara ini dalam kondisi yang sangat terpuruk. Daerah pedesaan pada saat itu dalam keadaan yang sangat kacau, sehingga penyelundup untuk benda-benda kebudayaan seperti patung dengan usia berabad-abad dengan mudah dicuri dan diselundupkan ke luar dari wilayah negara Kamboja. Kejadian tersebut terjadi atas tindakan *Khmer Merah* yang membuat kehancuran di Kamboja sehingga memungkinkan terjadinya penjarahan⁹. Dan setelah bertahun-tahun sejak kejadian tersebut maka masyarakat Kamboja meminta benda-benda budaya yang diselundupkan harus dikembalikan ke situs aslinya. Jika benda-benda ini dijarah untuk keuntungan, mereka harus dikembali ke negara asalnya.

⁸*Preah vihear dispute cambodia- thailand* diunggah pada tanggal 1 januari 2011 <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/print/features/2011/01/01/feature-16> diakses pada hari Rabu 16Maret 2015.

⁹Phomphen Post, “*Return Cambodia’s Treasures, Repair Our People’s Souls*” diunggah 26 Mei 2014 dalam <http://www.phnompenhpost.com/analysis-and-op-ed/return-cambodia> diakses 20 Maret 2016.

Kamboja menyadari bahwa saat ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, maka dalam usaha untuk menjaga dan melestarikan *cultural property*-nya Kamboja melakukan beberapa usaha dan salah satunya ialah dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat, dalam hal ini dijelaskan pada *Momernandum Of Understanding Between the Government of the United States of America And the Government of the Kingdom of Cambodia*. MOU kedua negara ini di tanda tangani pada tanggal 10 september 2003 di Phnom Phen¹⁰.

Berdasarkan perjanjian tersebut dapat di analisa kepentingan kedua negara dan proses pelaksanaan dari *Momernandum Of Understanding* yang telah disepakati oleh Amerika Serikat dan Kamboja selaku anggota dari UNESCO dalam megawasi dan mengatasi berbagai kasus penyelundupan benda-benda budaya khususnya yang terjadi di Kamboja. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis tertarik mengangkat judul **Peran *United States - Cambodia Cultural Property Agreement* dalam Penanganan *Trafficking In Cultural Property* di Kamboja.**

¹⁰*U.S-Cambodia Cultural Peoperty Agreement*. <http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/bilateral-agreements/cambodia/us-cambodia> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada pukul 19.50 WITA.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Cultural property yang lahir dari kebudayaan *Khmer* di Kamboja menjadi simbol dan identitas yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan banyaknya kasus-kasus *trafficking* pada benda-benda budaya di Kamboja maka pemerintah Kamboja memberikan perhatian lebih agar proses pengembalian patung-patung ini bisa terjadi.

Mengingat dalam judul yang penulis kemukakan di atas mencakup beberapa aspek yang cukup luas, maka penulis perlu membatasinya yaitu hanya berkisar kepada *Momemorandum Of Understanding Between The United States Of America and Cambodia* yang dimulai pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Dari latar belakang masalah dan pembatas yang diuraikan di atas, sehingga terdapat beberapa masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kepentingan nasional Kamboja dan Amerika Serikat dalam kerjasama *US-Cambodia Cultural Property Agreement*?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan dari *US-Cambodia Cultural Property Agreement*?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Dengan melihat pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kepentingan nasional Kamboja dan Amerika Serikat dalam kerjasama *US-Cambodia Cultural Property Agreement*.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan dari *US-Cambodia Cultural Property Agreement*.

Adapun kegunaan penelitian adalah :

1. Menjadi sumber informasi tentang seperti apa kepentingan nasional Kamboja dan Amerika Serikat dalam kerjasama *US-Cambodia Cultural Property Agreement*.
2. Memberikan informasi tentang bentuk pelaksanaan dari *US-Cambodia Cultural Property Agreement*
3. Memberikan informasi kepada para pengkaji hubungan internasional tentang seperti apa konvensi-konvensi internasional mengenai *protection* terhadap *cultural property* berpengaruh terhadap hubungan bilateral suatu negara dengan negara lain.

D. Kerangka Konseptual

1. Transnational Crime

Transnational crime atau kejahatan transnasional adalah bentuk tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Sebelumnya istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah *organized crime*. Oleh PBB, *transnational crime* dikategorikan ke dalam 18 bagian yaitu :

Money loundring, terrorist activities, traffickingin cultural property, theft of intellectual property, illicit traffic in arms,

*sea piracy, hijacking on land, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption, bribery of public officials, of offences committed by organized criminal groups*¹¹

Trafficking in cultural property atau kejahatan terhadap benda seni budaya merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam 18 jenis kejahatan transnasional oleh PBB. Kejahatan ini merupakan bentuk dari kegiatan pencurian atau penyelundupan benda-benda seni dari satu negara ke Negara lainnya. Berkaitan dengan kasus kejahatan ini maka *United Nation, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai satu-satunya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tugas khusus untuk melindungi warisan budaya dalam pengawasan upaya internasional untuk melindungi kreatifitas dan keragaman di seluruh dunia menyadari bahwa pemeliharaan warisan budaya adalah kepentingan besar umat manusia di dunia dan bahwa warisan ini perlu menerima perlindungan internasional.¹²

Dipedomani oleh prinsip-prinsip mengenai perlindungan benda budaya pada waktu sengketa bersenjata, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan dalam Pakta Washington 15 April 1935. Adapun yang merupakan benda seni disini ialah *intangible dan tangible cultural property* yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen-monumen arsitektur, seni

¹¹ *Transnational Crime* <http://osetc.gov.ph/crimes.php> diakses pada hari Kamis 17 Maret 2016. Pada pukul 20.05 WITA.

¹² Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung hal 21-22.

atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular; situs arkeologi; kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik; karya seni; sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang disebutkan sebelumnya¹³.

2. Kepentingan nasional

Pada hakekatnya kepentingan nasional merupakan salah satu komponen yang penting dalam Hubungan Internasional. Negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional sangat memerlukan kepentingan nasional dalam melakukan interaksi antar Negara dalam lingkup yang global. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang sering dipakai untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Secara konseptual, kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang mendeskripsikan prinsip dan tujuan negara untuk melakukan hubungan internasional.¹⁴

Kepentingan nasional utama dari setiap Negara di dunia sebenarnya sama, yaitu untuk tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Sedangkan dalam praktek nyatanya, kepentingan nasional

¹³ *Konvensi tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Sengketa Bersenjata Den Haag, 14 Mei 1954* <http://www.frrlawoffice.com/wp-content/uploads/2010/09/KONVBE.pdf> diakses pada hari Kamis 17 Maret 2016.

¹⁴ Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2009. *Pengantar studi hubungan internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

setiap Negara selalu berjalan seiringan dengan tujuan nasional dari Negara itu sendiri. Karena setiap Negara mempunyai tujuan nasional yang beragam dan sangat kompleks, maka tidak akan ada Negara yang mempunyai kepentingan nasional yang sama persis dengan kepentingan nasional Negara lain. Untuk mengimplementasikan tujuan kepentingan nasional ini, maka suatu negara harus lebih mengacu kepada kebijakan yang lebih mempertimbangkan beberapa persoalan dalam suatu negara.

3. Hubungan bilateral

Dalam Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola interaksi hubungan ini yakni berupa kerjasama (*Cooperation*).

Adanya jalinan hubungan kerjasama Amerika Serikat – Kambojasejalan dengan konsep hubungan bilateral, menurut Kusumohamidjojo:

Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama menciptakan kerjasama politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.¹⁵

Menurut bentuknya kerjasama antar negara terdiri atas kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral mengacu pada hubungan saling mempengaruhi antara dua negara. Sedangkan kerjasama

¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 1987. *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analitis*, Bina Cipta Jakarta, halaman. 86

multilateral mengacu pada hubungan saling mempengaruhi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Menurut sejarah perkembangannya hubungan antar negara, kerjasama bilateral adalah salah satu bentuk hubungan antar negara yang paling tertua dan sudah terjadi sejak lama. Seiring dengan semakin menguatnya multipolarisme dalam sistem ekonomi dan politik internasional, tetap pula dirasakan pentingnya kerjasama bilateral utamanya dalam menciptakan hubungan yang harmonis.

Manfaat untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain tentu lebih baik. Adanya perbedaan kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara sering menjadi pemicu ketegangan atau bahkan konflik antar negara. Di dalam hubungan internasional adanya hubungan yang melibatkan dua negara disebut hubungan bilateral. Hubungan ini mencakup beberapa bidang termasuk aspek ekonomi, politik, militer, dan pertahanan keamanan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe penelitian deskriptif-analitik dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk

menggambarkan fakta mengenai peranan *US-Cambodia cultural property agreement* dalam menangani kasus *trafficking in cultural property* di Kamboja.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan *library research*. Penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar harian. Adapun tempat-tempat penulis kunjungi dalam rangka pengumpulan data tersebut, yakni:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar;
- b. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin di Makassar;
- c. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Hassanudin di Makassar

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini. data tersebut nantinya akan diperoleh dari sumber seperti buku, jurnal, surat kabar, portal berita, serta situs-situs resmi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun

dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat analisis kualitatif.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

BAB II

TUJUAN PUSTAKA

A. Transnational crime

Perkembangan Globalisasi yang seiring dengan semakin canggihnya teknologi memudahkan terjadinya hubungan suatu negara dengan negara lain, hal tersebut disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan dan kemajuan peradaban, juga membawa dampak negatif antara lain telah mendorong lahirnya kejahatan lintas batas negara di seluruh belahan dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, seakan mengesampingkan batas-batas negara, yang kemudian menyebabkan semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain.¹⁶ Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional. Dengan demikian kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi.

Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Sebelumnya istilah yang telah lebih dulu berkembang

¹⁶Katherine Teilman and Malcolm Klein, *Op.Cit* hal 53.

adalah *Organized Crime*. Adapun kejahatan yang termasuk kategori transnational crime dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri¹⁷ :

1. Dilakukan di lebih dari satu negara.
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,
3. Melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,
4. Berdampak serius pada negara lain. Organized criminal group memiliki karakteristik yaitu:
 - a. Memiliki struktur grup,
 - b. Terdiri dari 3 orang atau lebih,
 - c. Dibentuk untuk jangka waktu tertentu,
 - d. Tujuan dari kejahatan adalah melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang diatur dalam konvensi,
 - e. Bertujuan mendapatkan uang atau keuntungan materil lainnya

PBB telah mensahkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau yang dikenal dengan sebutan *Palermo*

¹⁷ Frank J. Marine ,*The Threats Posed By Transnational Crimes And Organized Crime Groups*. Dalam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rudYMI3p-EJ:www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No54/No54_06VE_Marine.pdf+&cd=18&hl=en&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 5 mei 2016 pukul 15.35 WITA

Convention pada plenary meeting ke-62 tanggal 15 November 2000.

Konvensi ini memiliki empat (4) protokol¹⁸ yaitu;

1) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Organisasi Menentang Kejahatan Transnasional),

2) *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat Udara dan Laut, melengkapi Konvensi PBB Organisasi Menentang Kejahatan Transnasional),

3) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi PBB Organisasi Menentang Kejahatan Transnasional),

4) *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

¹⁸United Nations Office On Drugs And Crime, *united nations convention against Transnational organized crime And the protocols 2004* dalam https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yNviRHJrrCsJ:https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 5 mei 2016 pukul 16.05 WITA

(Protokol Menentang terlarang Manufaktur dan Perdagangan Senjata Api, bagian mereka dan Komponen dan Amunisi, melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir).

Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu, *Money Laundering* (pencucian uang), *Terrorism* (terorisme), *Trafficking In Cultural Property* (Pencurian Seni dan Objek Budaya), *Theft of Intellectual Property* (Pencurian Kekayaan Intelektual), *Illicit Arms Trafficking* (Trafficking Senjata Gelap), *Aircraft Hijacking* (pembajakan pesawat), *Sea Piracy* (pembajakan laut), *Insurance Fraud* (penipuan asuransi), *Computer/CyberCrime* (kejahatan dunia maya), *Environmental Crime* (kejahatan lingkungan), *Trafficking in Persons* (perdagangan orang), *Trade in Human Body Parts* (perdagangan organ tubuh manusia), *Illicit Drug Trafficking* (perdagangan obat terlarang), *Fraudulent Bankruptcy* (penipuan Kepailitan), *Infiltration of Legal Business* (infiltrasi bisnis legal), *Corruption and Bribery of Public or Party Officials* (korupsi dan penyuapan pejabat publik atau partai)¹⁹.

Trafficking in cultural property atau kejahatan terhadap benda seni budaya merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam 18 jenis kejahatan transnasional oleh PBB. Kejahatan ini merupakan bentuk dari

¹⁹Ralf Emmers, *The Securitization Of Transnational Crime In ASEAN 2002* dalam <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=Cache:4wfe-2f9scj:https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/wp39.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id> Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2016 Pukul 16.20 WITA

kegiatan pencurian atau penyelundupan benda-benda seni dari satu negara ke Negara lainnya. Berkaitan dengan kasus kejahatan ini maka *United Nation, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai satu-satunya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tugas khusus untuk melindungi warisan budaya dalam pengawasan upaya internasional untuk melindungi kreatifitas dan keragaman di seluruh dunia menyadari bahwa pemeliharaan warisan budaya adalah kepentingan besar umat manusia di dunia dan bahwa warisan ini perlu menerima perlindungan internasional.

Dipedomani oleh prinsip-prinsip mengenai perlindungan benda budaya pada waktu sengketa bersenjata, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan dalam Pakta Washington 15 April 1935. Adapun yang merupakan benda seni disini ialah *intangible dan tangiblecultural property* yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen-monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular; situs arkeologi; kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik; karya seni; sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang disebutkan sebelumnya.²⁰

Pada kerjasama Amerika Serikat dan Kamboja akan membahas bagaimana para pelaku kejahatan transnasional dalam hal ini *trafficking in*

²⁰Katherine Teilman and Malcolm Klein *Op.Cit* hal 56-57

cultural property menjarah dn menyelundupkan warisan budaya dari Kamboja ke negara lain. Hal tersebut melibatkan beberapa pihak yang bisa saja berupa kolektor (individu) atau museum-museum seni dinegara - negara barat.

B. Kepentingan Nasional

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang sejalan dengan kebutuhan domestiknya. Kepentingan Nasional atau yang dikenal dengan istilah *national interest* pada hakekatnya merupakan salah satu komponen yang penting dalam Hubungan Internasional. Negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional melakukan interaksi antar negara karena didasarkan oleh kepentingan nasionalnya. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya.²¹

Kepentingan nasional merupakan sebuah fenomena alami yang pasti dimiliki oleh tiap aktor internasional. Kepentingan nasional tentu saja menjadi prioritas utama bagi tiap negara dalam upaya pencapaian kepentingannya tersebut. Oleh sebab itu, tidak heran jika terjadi banyak perang kepentingan di antara dua atau lebih negara dalam dunia internasional. Pada hakekatnya kepentingan nasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional di sisi lain juga merupakan refleksi dari tujuan nasional yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Singkatnya, negara kemudian

²¹Sudri Yusuf, 1989. *Hubungan Internasional & Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan., hal. 11.

menetapkan kebijakan luar negerinya sebagai media untuk memperoleh kepentingan atau tujuan nasionalnya tersebut. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional

Hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam memproduksi. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional.²²

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya, bahkan *history* yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara ingin melakukan kerjasama dengan melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan negara lain yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara.

Konsep ini merupakan konsep yang sering dipakai untuk mendeskripsikan atau menjelaskan perilaku internasional. Secara konseptual, kepentingan nasional merupakan konsep yang mendeskripsikan prinsip dan tujuan negara untuk melakukan hubungan internasional.²³ Kepentingan nasional utama dari setiap Negara di dunia

²²Aleksius Jemadu, 2014. *Politik Global*, Edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 50.

²³Ibid

sebenarnya sama, yaitu untuk tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Sedangkan dalam realitanya, kepentingan nasional setiap Negara selalu berjalan seiringan dengan tujuan nasional dari Negara itu sendiri. Karena setiap Negara mempunyai tujuan nasional yang beragam dan sangat kompleks, maka tidak akan ada Negara yang mempunyai kepentingan nasional yang sama persis dengan kepentingan nasional Negara lain²⁴.

Sebuah negara harus peka terhadap perubahan yang terjadi dalam sistem dunia internasional agar dapat bertahan. Sebuah negara juga perlu memahami dengan cermat kondisi dalam negerinya serta strategi-strategi apa yang harus dilakukan agar kepentingan nasionalnya senantiasa terjamin. Hal ini dikarenakan konsep kepentingan nasional sifatnya sangat kompleks, mudah berbenturan dengan kepentingan negara lain yang jika gagal dapat mengakibatkan perang, dan memerlukan power untuk memperolehnya. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol satu negara terhadap negara lain.²⁵ Hans J. Morgenthau kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa,

Kemampuan minimum bangsa-bangsa adalah untuk melindungi identitas fisik, politik dan identitas budaya mereka oleh gangguan negara-negara lain. Negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya, mempertahankan identitas politik, mempertahankan rezim-rezim ekonomi-politiknya seperti misalnya demokratis kompetitif,

²⁴ibid

²⁵ibid

komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan totaliter dan sebagainya.²⁶

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan hal yang vital bagi suatu negara karena terkait dengan eksistensinya. Untuk tetap berdiri sebagai negara yang berdaulat, suatu negara harus mempertahankan kedaulatan atau yuridiksinya dari campur tangan pihak asing. Negara berkepentingan untuk mempertahankan keutuhan wilayah sebagai wadah bagi entitas politik tersebut.²⁷ Untuk itu negara harus memiliki *power* (kekuasaan) agar negara bisa bertahan dalam panggung internasional. Negara harus bisa menggunakan segenap sumber daya yang terwujud maupun tidak berwujud serta seluruh asetnya, untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa internasional agar membawa hasil yang memuaskan.

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.²⁸ Kepentingan nasional merupakan hal yang berhubungan dengan power negara. Pandangan ini dijelaskan oleh Morgenthau, dimana kekuatan diperlukan untuk menacapai kepentingan. Kepentingan nasional ini diletakkan di atas kepentingan regional. Setiap

²⁶ Morgenthau dalam P. Anthonius Sitepu, 2011. *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 165.

²⁷ Aleksius Jemadu, *Op. Cit* hal 52

²⁸ *Ibid*

negara memiliki sasaran dan tujuan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional tersebut bergerak seperti sinyal otomatis yang memerintahkan para pemimpin negara kapan dan kemana harus bergerak.²⁹

Pembentukan kepentingan nasional merupakan tahapan awal meskipun masih abstrak sifat konsepnya dalam merumuskan politik luar negeri. Sebelum konsep dipakai sebagai tuntutan tindakan, sang negarawan harus menghadapi suatu masalah klasik, yaitu menyesuaikan tujuan dengan sarana yang ada³⁰. Tujuan tindakan negara dalam politik internasional, yaitu kepentingan nasional dan tujuan nasional yang bersumber daripadanya, biasanya sudah dispostulasikan atau didalilkan secara apriori. Sebelum kebijakan dapat disusun, negarawan haruslah memahami dan menyesuaikan fakta-fakta permasalahannya dengan sistem konseptual yang dibentuk oleh kumpulan tujuan tadi dengan sarana yang ada padanya.

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang.³¹ Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting. Politik global adalah perjuangan mencapai kepentingan nasional dimana para pemimpin harus tetap waspada terhadap

²⁹ Jackson Robert, Georg Sorensen, *Op.Cit*, hlm.115

³⁰ *ibid*

³¹ Sudri Yusuf, *Loc.Cit*

usaha-usaha negara lain untuk mendapat tambahan kekuasaan yang mungkin membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup negara mereka sendiri. Menghadapi usaha-usaha semacam itu negara berusaha untuk menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain.

Salah satu caranya dengan membentuk aliansi atau bergabung ke dalam institusi internasional dan terlibat ke dalam kesepakatan-kesepakatan kerja sama ketika hal tersebut cocok bagi negara yang bersangkutan. Bentuk aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh keuntungan dan keamanan di mana harus ada timbal balik dari negara-negara yang membentuk aliansi³². Apabila dari sebuah aliansi yang diciptakan namun di dalamnya tidak dapat memenuhi kepentingan negara yang ikut serta, kecil kemungkinan aliansi tersebut dapat bertahan lama.

Suatu negara harus bertindak secara nyata ketika memutuskan atau mendeklarasikan kepentingan nasionalnya. Pada dasarnya kepentingan nasional adalah hal yang bersifat abstrak, tetapi sarana yang dilakukannya nyata. Dengan demikian kepentingan nasional itu bersumber dari pemakaian sintesis yang digeneralisasikan pada keseluruhan situasi, dimana negara mengambil tempat dalam politik dunia. Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Suatu negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih cenderung untuk memperhatikan

³²Budi Winarno, *Loc. Cit.*

keseimbangannya dan melanjutkan usaha ke arah tujuannya daripada mengubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru.

Dalam MoU yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Kamboja dapat dilihat bahwa kedua negara ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yang tidak lain merupakan national interest dari kedua negara dan dengan melihat perbedaan karakteristik, sejarah dan budaya kedua negara maka tujuan kedua negara ialah berbeda tetapi masih dalam aspek kebudayaan.

C. Hubungan bilateral

Dalam Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang terjadi di masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola interaksi hubungan ini yakni berupa kerjasama (*Cooperation*). Seperti yang dijelaskan oleh Rosecrance saat ini telah memasuki era globalisasi dimana negara-negara bersaing dalam menentukan kekuatan atau *power* tidak lagi hanya sebatas seberapa hebat pertahanan militernya tetapi juga telah menyentuh aspek aspek lainnya³³. Kekuatan suatu negara dalam pembuktian tersebut, bukan lagi hanya tergantung pada posisi negara di peringkat politik dan militer, dimana sepanjang sejarah negara berupaya mencari kekuasaan dengan alat-alat kekuatan militer dan perluasan wilayah. Hal itu bukan lagi menjadi fokus

³³Richard Rosecrance, *introduction : the Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World*, Chapters 1 & 2 (pp. 16-43) tahun 2000 dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xWx7RtxnaNoJ:www.olivialau.org/ir/archive/ros4.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id> Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2016 Pukul 16.30 WITA

negara saat ini, Negara lebih memperhatikan pada bagaimana membentuk tata pembangunan ekonomi yang baik dengan melakukan kerjasama berupa perdagangan luar negeri. Hal demikian dapat mencapai keunggulan dan kesejahteraan yang lebih mencukupi. Kondisi yang terjadi saat ini adalah karakter yang berubah dan dasar dari produksi ekonomi, yang terkait pada modernisasi.

Di masa lalu perebutan wilayah dan sumber daya alam yang banyak adalah kunci kejayaan. Namun pada saat ini, bukan lagi hal tersebut yang menjadi fokus utama melainkan munculnya aspek lain seperti kekuatan tenaga kerja yang sangat berkualifikasi, akses informasi, dan modal keuangan yang menjadi kunci keberhasilan. Sehingga demi membangun negaranya harus dilakukan hubungan bilateral atau kerjasama. Hubungan bilateral pada dasarnya merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak. Dalam hal ini terdapat dua aktor yang berperan yang disebut dengan negara. Aktor disini bukan hanya sebatas pemerintah yang mewakili negara namun juga dapat berupa instansi atau pihak swasta yang berada dalam naungan sebuah negara. Hal demikian sejalan dengan kepentingan seperti apa yang diinginkan negara dalam menjalin kerjasama. Hubungan bilateral tidak terlepas dari kata '*cooperation*'³⁴. *Cooperation* atau kerjasama tentu didukung oleh aktor-aktor yang menjalankan kerjasama dan kepentingan seperti apa yang ingin dicapai. Dalam hal ini aktor dapat berupa negara ke negara, negara ke organisasi pemerintah,

³⁴Jackson Robert, Georg Sorensen, *Op. Cit*, hlm.152

maupun negara keorganisasi non-pemerintah. Fungsinya tentu kembali pada subjek yang menjalankan kerjasama.

Dengan adanya hubungan bilateral pencapaian suatu negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia akan lebih mudah diciptakan. Dengan demikian tak satu bangsa pun di dunia ini dapat membebaskan diri dari keterlibatan dengan bangsa dan negara lain. Menurut Didi Krisna dalam kamus politik Internasional mendefinisikan bahwa Hubungan Bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara).³⁵

. Bentuk hubungan bilateral dapat berupa kerjasama dalam berbagai bidang. Kerjasama dalam hubungan diplomatik yang memfokuskan pada kondisi politik negara yang menjalin kerjasama, kemudian kerjasama ekonomi yang diciptakan guna memenuhi pembangunan perekonomian, kerjasama militer sebagai security of the state dan juga kerjasama sosial-budaya hingga pendidikan yang kesemua itu menjadi step-step bagi negara-negara yang terus ingin maju. Dalam hubungan bilateral, dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa negara satu dengan negara lain yang menjalin kerjasama memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut yang saat ini membuat negara memiliki sifat saling ketergantungan antara satu sama lain³⁶.

³⁵Didi Krisna, dalam Fatma Septya (*Kerjasama Ekonomi Indonesia-Brasil*) Makassar: Unhas hal. 16.

³⁶Jackson Robert, Georg Sorensen, *Loc. Cit.*

Faktor yang paling menentukan dalam pembuatan keputusan dalam merumuskan politik luar negeri suatu negara ialah kepentingan nasional. Kepentingan nasional utamanya adalah pada hal yang dianggap penting bagi kesejahteraan nasional, kemakmuran, dan keberlanjutan³⁷. Adanya jalinan hubungan kerjasama Amerika Serikat – Kamboja sejalan dengan konsep hubungan bilateral, menurut Kusumohamidjojo Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama menciptakan kerjasama politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.

Menurut bentuknya kerjasama antar negara terdiri atas kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral mengacu pada hubungan saling mempengaruhi antara dua negara. Sedangkan kerjasama multilateral mengacu pada hubungan saling mempengaruhi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Menurut sejarah perkembangannya hubungan antar negara, kerjasama bilateral adalah salah satu bentuk hubungan antar negara yang paling tertua dan sudah terjadi sejak lama³⁸. Seiring dengan semakin menguatnya kerjasama multilateral dalam sistem ekonomi dan politik internasional, tetap pula dirasakan pentingnya kerjasama bilateral utamanya dalam menciptakan hubungan yang harmonis.

Manfaat untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain tentu sejalan dengan tujuan masing-masing negara yang bekerjasama.

³⁷Budiono Kusumohamidjojo, *Op.Cit* halaman. 86

³⁸*ibid*

Adanya perbedaan kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara sering menjadi pemicu ketegangan atau bahkan konflik antar negara. Di dalam hubungan internasional adanya hubungan yang melibatkan dua negara disebut hubungan bilateral. Hubungan ini mencakup beberapa bidang termasuk aspek ekonomi, politik, militer, dan pertahanan keamanan³⁹.

Pada umumnya negara menjadikan aspek politik maupun ekonomi sebagai fokus sebuah negara. Dan aspek sosial-budaya maupun pendidikan sebagai faktor pendukung dalam hubungan bilateral. Pendidikan dalam hal ini bidang keilmuan seperti alih teknologi menjadi kerjasama yang banyak dilakukan oleh negara-negara. Hal ini terjadi karena kepentingan negara yang melakukan kerjasama negara yang dituju sebagai alih teknologi mendapatkan pengaruh besar melihat alih teknologi dapat merubah sebuah negara. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh para pelaku negara (*state-actor*) maupun dari pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan dan interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan.⁴⁰

Kerjasama yang terjadi merupakan bentuk kerjasama yang dijalankan seiring dengan meluasnya globalisasi. Globalisasi merupakan

³⁹Iva rachmawaty, 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: 11-12.

⁴⁰Abdul Solichin Wahab, *Loc. Cit.*

suatu proses hubungan sosial secara relatif yang memperlihatkan tidak adanya batasan-batasan secara nyata, dimana ruang lingkup kehidupan manusia itu semakin bertambah dengan memainkan peranan yang lebih luas dalam dunia sebagai satu kesatuan tunggal⁴¹. Melalui proses globalisasi secara tidak langsung masyarakat internasional dalam hal ini negara-negara mengikuti arus yang menciptakan persaingan antara negara-negara karena tidak adanya sekat yang membatasi. Hal ini demikian mendukung ketika globalisasi menciptakan hal-hal modern sebagai metamorfosis perkembangan dari modal teknologi.

Amerika Serikat melakukan hubungan bilateral untuk permasalahan budaya tidak hanya dengan negara Kamboja tetapi dengan beberapa negara lain yang mengalami hal serupa, hal ini diperlukan untuk membuat kerjasama lebih fokus untuk dua negara dan pencapaian tujuan lebih mudah oleh kedua negara yang melakukan kerjasama.

Kebudayaan yang dimiliki Amerika Serikat dan Kamboja sangat berbeda, baik itu dari nilai-nilai yang dianut maupun hasil karya ciptanya. Kebudayaan kamboja berasal dari nilai kepercayaan agama sedangkan kebudayaan Amerika Serikat berasal dari multikulturalisme yang bercampur menjadi satu. Untuk membahas lebih lanjut kerjasama ini maka perlu penjelasan mengenai kebudayaan pada kedua negara sehingga perbedaan bisa terlihat dengan jelas dan juga alasan atau kepentingan dibalik MoU antara Amerika Serikat dan Kamboja.

⁴¹*Ibid hal 20*

BAB III

***UNITED STATES – CAMBODIA CULTURAL PROPERTY AGREEMENT* DAN PENANGANAN *TRAFFICKING IN CULTURAL PROPERTY* DI KAMBOJA**

A. Kejahatan terhadap warisan budaya

Kebudayaan yang tercipta dalam suatu negara menghasilkan warisan budaya baik itu dalam bentuk intangible cultural heritage ataupun tangible cultural heritage, pada tahun 1954, ketika konvensi mengenai perlindungan terhadap benda budaya untuk pertama kalinya dikeluarkan hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat internasional mulai menyadari pentingnya menjaga warisan budaya.

Keberadaan peninggalan sejarah serta adat istiadat budaya masyarakat perlu mendapatkan perhatian dari semua elemen masyarakat untuk dilestarikan keberadaannya, karena keberadaannya dapat dijadikan sumber pemersatu bangsa, dan bagi upaya pengenalan nilai warisan budaya kepada generasi muda saat ini. Memang upaya untuk melestarikan peninggalan sejarah yang tersebar di situs sejarah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, terlebih untuk negara yang sedang dilanda perang.

Budaya merupakan salah satu elemen *soft power* yang mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi bangsa lain. Sebagaimana penjelasan Joseph Nye mengenai *soft power* dalam bukunya *Soft Power* :

The Means to Success in World Politics, dimana ia mendefinisikan sebagai kemampuan menciptakan pilihan-pilihan bagi orang lain, yakni kemampuan memikat atau mengendalikan pihak lain agar rela memilih melakukan suatu hal yang dikehendaki tanpa perlu untuk memintanya. Nye menyebutkan bahwa *soft power* suatu negara terdapat terutama dalam tiga sumber, yakni kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negerinya. Joseph Nye mengatakan bahwa disamping sisi nilai tradisi dan bangunan politik serta kebijakan luar negeri sebuah negara, ada sisi lain yang memiliki nilai-nilai tersendiri.⁴²

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai bentuk daya tarik yang sangat bersifat emosional dan psikologis ini maka budaya dalam suatu negara dapat menjadi modal besar bagi sebuah bangsa untuk dapat menjalin hubungan kerjasama lebih jauh dengan negara lain. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan melakukan kerjasama budaya karena setiap negara memiliki kebudayaan yang tidak sama sehingga ada begitu banyak kebudayaan yang dapat dipelajari. Bahkan lebih dari itu, dengan adanya bentuk pendekatan budaya, dapat menjadi acuan dan sandaran keberlangsungan hubungan harmonis antar bangsa.⁴³

⁴² Koentjaraningrat, *Loc. Cit.*

⁴³ Judit Trunkos, *What Is Soft Power Capability And How Does It Impact Foreign Policy?* Diunggah pada tanggal 06 januari 2013 Dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?Q=cache:2yuhay1peowj:www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2013-acdusa/What-Is-Soft-Power-Capability-And-How-Does-It-Impact-Foreign-Policy--Judit->

Kejahatan terhadap benda budaya baik itu dalam bentuk perampasan, pengrusakan, pencurian, penyelundupan, ataupun merekayasa merupakan tindak kriminal yang terjadi karena nilai dari benda budaya sangat tinggi dan banyaknya kolektor pribadi maupun museum yang akan mengeluarkan biaya demi mendapatkan benda – benda budaya tanpa memerdulikan benda budaya itu diperoleh secara legal atau ilegal. Hal inilah yang menjadi alasan untuk pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk mencuri dan kemudian menyelundupkan benda budaya.

Negara negara yang memiliki sumber daya warisan budaya yang melimpah kebanyakan merupakan negara berkembang dimana perekonomian menjadi salah satu masalah utama. Untuk memenuhi kebutuhan maka tidak sedikit pihak yang akan melakukan segala cara dan kejahatan terhadap benda budaya merupakan salah satu kegiatan yang menjajikan secara ekonomi. Maka sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan benda-benda budaya yang ada di dalam negaranya.

Adapun yang menjadi negara tujuan dari warisan budaya yang didapatkan secara ilegal ialah negara negara besar yang banyak terdapat aktor penikmat benda-benda seni seperti museum maupun kolektor

[Trunkos.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id](#)Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2016 Pukul 16.20 WITA.

pribadi. Negara besar seperti Amerika Serikat merupakan pasar yang sangat strategis untuk perdagangan benda budaya secara ilegal karena nilai tinggi yang berlaku pada setiap benda budaya ini dan ada pihak yang mau mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan benda atau arkeologi budaya dengan kata lain sangat mudah untuk menarik peminat jika dipasarkan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

B. Warisan budaya di Negara Kamboja

Kamboja merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nama resmi negara Kamboja adalah *Kingdom of Cambodia* dan ibukota negara adalah Phnom Penh. Secara geografis negara Kamboja terletak di Semenanjung Indochina, berbatasan darat di sebelah utara dengan Laos dan Thailand, di sebelah timur dan selatan dengan Vietnam dan sebelah barat dengan Teluk Thailand. Sebagian besar negara kamboja terdiri dari dataran rendah yang dikelilingi pegunungan di utara dan barat daya serta di sebelah timur mengalir sungai Mekong sampai Vietnam di selatan⁴⁴. Negara Kamboja memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah baik dari bidang pertanian, hasil hutan, maupun perikanan.

Masyarakat Kamboja sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Lebih dari 80 persen penduduk tinggal di dataran pusat di mana beras merupakan produk yang paling penting. Selain itu juga tersedia

⁴⁴Leonard C. Overton, *About Cambodia* diunggah tanggal 5 juni 2016 dalam <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WXd6OBhFjiYJ:https://www.britannica.com/place/Cambodia+&cd=16&hl=en&ct=clnk&gl=id> Diakses Pada Tanggal 15 juni 2016 Pukul 14.20 WITA.

industri bahan baku seperti karet dan kapas. Kamboja salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang rawan konflik dalam pemerintahannya. Tidak hanya terlibat konflik dalam negeri, Kamboja juga sering dilibatkan dalam perang oleh negara tetangga antara Vietnam dan Thailand yang saling berebut wilayah dan pengaruh di Indochina. Konflik yang terjadi di Kamboja sebagian besar merupakan konflik perebutan tampuk kekuasaan.

Kamboja menjadi negara merdeka pada tahun 1954 setelah hampir seabad menjadi negara jajahan Perancis. Kemerdekaan yang telah diperoleh Kamboja tidak serta merta membawa Kamboja menuju kesejahteraan yang lebih baik⁴⁵. Kemerdekaan yang telah diperoleh itu telah membawa babak baru bagi kehidupan rakyat Kamboja. Dalam kehidupan yang baru ini rakyat Kamboja mengalami penderitaan yang cukup panjang. Hal itu terjadi sebagai akibat dari timbulnya konflik politik dalam negeri Kamboja yang memicu timbulnya peperangan. Konflik itu terjadi karena ketidakpuasan suatu golongan tertentu sehingga berusaha untuk merebut kursi kepemimpinan di Kamboja.

Penduduk asli di Kamboja adalah *Khmer* yang terdiri 85-90 persen dari total populasi kamboja dan menggunakan bahasa yang tidak memiliki kesamaan dengan bahasa utama lainnya seperti bahasa *Thai*, *Laotian*, dan *Vietnamese*. Masyarakat Kamboja juga memiliki sebuah aksara yang disebut aksara Khmer. Aksara Khmer ini memiliki keunikan, yakni setiap hurufnya sudah merupakan sebuah kata. Adapun kelompok yang berkuasa

⁴⁵David J Steinbeirg & Herbert Harold Vreeland, 1959. *Cambodia : Its People, Its Society, Its Culture*. Hraf Pres. Cambodia hal 5-6.

adalah raja, kerajaan, bangsawan, juga merupakan golongan khmer atau keturunan asli kamboja dengan demikian golongan khmer dan nilai-nilainya yang dengan kata lain menjadi kelompok mayoritas telah mendominasi beberapa aspek di pemerintah nasional, industri perdagangan dan politik.

Adapun kelompok minoritas yang keberadaannya juga diperhitungkan ialah orang China dan Vietnam, kelompok ini memiliki peran di kehidupan kamboja dan juga berpartisipasi dalam industri perdagangan dan memegang kontrol dari sistem ekonomi di negara ini. Walaupun demikian kelompok ini tetap memiliki batasan untuk tidak dapat berperan dalam pemerintahan. Selain itu Keagamaan di kamboja terpisah secara legal dari setiap urusan negara, para pemuka agama seperti biksu tidak dapat memberikan suara dan tetap memisahkan diri dari dunia politik.⁴⁶

Kebudayaan Negara Kamboja dipengaruhi oleh agama mayoritas yaitu agama *Budha Theravada* yang menggantikan *Brahmanism*. adanya bangunan *Angkor Wat* menjadi Bukti nyata besarnya pengaruh agama tersebut. *Angkor Wat* adalah sebuah bangunan seperti Kuil atau candi, yang terletak di kota Angkor atau 5,5 kilometer (3,4 mil) sebelah utara kota modern *Siem Reap*, Negara Kamboja⁴⁷. Diantara kuil-kuil yang

⁴⁶Ibid

⁴⁷Dr.Melody Rod-ar *Angkor Wat* diunggah pada tahun 2012 dalam <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eqpJjUtwczcJ:https://www.khanacademy.org/humanities/art-asia/southeast-asia/mainland-se-asia/a/angkor->

lainnya, hanya Angkor Wat lah yang keadaan bangunannya terawat dari pada kuil-kuil yang lain, karena Angkor Wat ini telah dialih fungsi kan menjadi kuil Budha serta dirawat sedemikian rupa. Sekitar tahun 1992 kuil Angkor Wat masuk dalam bagian Situs Warisan Dunia UNESCO. Kemudian Angkor Wat mendapat nama Julukan dengan sebutan Kuil Kota.

Kamboja memperoleh kemerdekaan penuh pada 9 November 1953 dari Perancis. Sejak saat itu Kamboja mulai mengembangkan politik luar negeri untuk mengamankan integritas wilayah dan kedaulatan negaranya. Hal itu dilakukan agar Kamboja memperoleh pengakuan dari dunia internasional sebagai negara yang berdaulat dan merdeka secara penuh. Selain itu, Kamboja juga menghadapi masalah bangkitnya pergolakan dan besarnya ketegangan politik khususnya menjelang pemilu 1955.⁴⁸

Kondisi pemerintahan Kamboja yang sering bergonta-ganti pemimpin, khususnya pada masa pemerintahan *Pol Pot* berakibat berubahnya ideologi maupun haluan politik di negara tersebut. Baik pada masa pemerintahan Sihanouk, Lon Nol, maupun Pol Pot memiliki ciri khas sendiri yang memberi warna pada kehidupan rakyat Kamboja. Ironinya pergantian kepemimpinan tersebut tidak membawa Kamboja ke arah yang

[wat+&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=id](#) diakses pada tanggal 21 juli 2016 pukul 13.16 WITA

⁴⁸David J Steinbeirg & Herbert Harold Vreeland *Op. Cit* hal 2-3.

lebih baik, malah membuat rakyat Kamboja semakin menderita karena pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kamboja menjadi sorotan dunia internasional ketika di bawah pemerintahan Pol Pot. Saat itu Pol Pot memproklamkan Kamboja sebagai negara baru dengan nama Democratic Kampuchea. Ia menyebutkan tahun 1975 sebagai “*Year Zero*” yang berarti bahwa segala sesuatu ingin dibangun dari titik nol oleh rezim ini. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (*Liberation Day*) dari rezim Lon Nol yang sangat buruk. Diharapkan pergantian kepemimpinan itu membawa dampak yang lebih baik, namun hal yang diharapkan ternyata malah sebaliknya.⁴⁹

Seperti halnya negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang pernah dikuasai oleh bangsa Barat, Kamboja merupakan negara di bawah kekuasaan Perancis. Saat Perancis berkuasa di Kamboja, Perancis berusaha untuk melonggarkan kekuasaannya dengan cara mengangkat Pangeran Norodom Sihanouk sebagai raja Kamboja. Norodom Sihanouk yang masih berusia 19 tahun pada tahun 1941. Keputusan Perancis tersebut cukup masuk akal karena sang raja masih belia sehingga mudah untuk dikendalikan. Seiring berjalannya waktu Sang raja pun tumbuh dewasa dan selalu berusaha memperjuangkan kemandirian bagi bangsanya

⁴⁹Ben kiernann, *Pol pot in cambodia 1975-1979* dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IDPJVxKxx5IJ:www.historyplace.com/worldhistory/genocide/pol-pot.htm+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id> Diakses Pada Tanggal 27 juni 2016 Pukul 19.40 WITA.

untuk menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Pemerintah Perancis pun sempat mengeluh karena Sang raja yang dianggap akan mudah dikendalikan malah bertindak sebaliknya. Akhirnya Perancis memberikan kemerdekaan penuh atas negara Kamboja pada tahun 1953.⁵⁰

Setelah Kamboja memperoleh kemerdekaan penuh, Pangeran Norodom Sihanouk mulai membangun hubungan luar negeri dengan negara-negara tetangga maupun bangsa Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Tahun 1955 hingga 1960 Kamboja dipimpin oleh Norodom Suramarit. Bulan Maret 1970 *Lon Nol* berhasil mengambil alih kepemimpinan di Kamboja dari Sihanouk⁵¹. Pemerintahan *Lon Nol* di Kamboja mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Dukungan diperkuat dengan bantuan-bantuan yang diterima *Lon Nol* dari negara adidaya itu. Rezim ini tidak disukai oleh masyarakat Kamboja karena korup dan tidak berpihak kepada rakyat.

Tahun 1975 merupakan tahun yang menandai runtuhnya sistem kekuasaan liberalisme barat dukungan Amerika di Kamboja. Rezim *Lon Nol* yang memerintah Kamboja, digulingkan oleh *Pol Pot*, penganut politik komunisme radikal. Bahkan, para sejarawan menyebut dirinya lebih komunis dari komunisme di Uni Soviet dan Cina. Hal tersebut karena *Pol Pot* merubah ideologi negara secara radikal dan membabi buta tanpa

⁵⁰Ibid

⁵¹*Lon Nol Regime - 1970-1975* dalam diunggah pada tanggal 20 april 2013 <http://www.globalsecurity.org/military/world/cambodia/history-lon-nol.htm> di akses pada diakses 18 juli 2016 Pukul 20.39 WITA

memikirkan kondisi rakyatnya. Komunis radikal memerintah Kamboja dari tahun 1975-1979, selama periode tersebut 1,7 juta orang tewas akibat penyiksaan, penyakit, beban kerja yang berat dan kelaparan. Pol Pot sebenarnya merupakan nama samaran dari Saloth Sar. Nama tersebut digunakan Saloth Sar sebagai simbol revolusioner untuk mendukung perjuangannya. Ia mengikuti beberapa tokoh dunia untuk mengubah nama aslinya dalam melakukan revolusinya. Bagi rakyat Kamboja Pol Pot merupakan pemimpin yang sangat kejam dan menakutkan karena menimbulkan penderitaan bagi rakyat Kamboja pada masa pemerintahannya⁵².

Terdapat 343 ladang pembantaian yang ditemukan di seluruh wilayah Kamboja, akibat dari praktik pemberantasan jejak-jejak liberalisme yang dilakukan oleh rezim Pol Pot. Ladang tersebut merupakan bukti nyata dari praktik kekejaman Pol Pot untuk membersihkan Kamboja dari sistem pemerintahan Lon Nol pada periode sebelumnya yang lebih memihak pada Barat. Ladang-ladang pembantaian tersebut hingga kini masih ada dan merupakan salah satu daerah yang dijadikan museum oleh pemerintah Kamboja untuk mengenang peristiwa yang membuat Kamboja kehilangan lebih kurang 1,7 juta jiwa rakyatnya

⁵²*Pol pot: the early years* diunggah pada tanggal 05 juni 2012 dalam <http://www.history.com/topics/pol-pot> diakses 13 juni 2016 pukul 11.05 WITA.

dan mengenang bagaimana negara itu pernah mengalami satu masa paling kelam dalam perjalanan sejarah bangsanya.⁵³

C. *Trafficking In Cultural Property* di Kamboja

Kerajaan Kamboja memiliki warisan budaya yang unik yang telah memberi kesaksian lebih dari 5.000 tahun sejarah. Pada awal tahun 1970, Kamboja mengalami perang sipil dan terjadinya kasus pembunuhan massal di beberapa tempat dan membuat negara ini dalam kondisi yang sangat terpuruk. Daerah pedesaan pada saat itu dalam keadaan yang sangat kacau, sehingga penyelundup untuk benda-benda kebudayaan seperti patung dengan usia berabad-abad dengan mudah dicuri dan diselundupkan ke luar dari wilayah negara Kamboja. Kejadian tersebut terjadi atas tindakan *Khmer Merah* yang membuat kehancuran di Kamboja sehingga memungkinkan terjadinya penjarahan. Dan setelah bertahun-tahun sejak kejadian tersebut maka masyarakat Kamboja meminta benda-benda budaya yang diselundupkan harus dikembalikan ke situs aslinya.

Selain itu kamboja juga kehilangan banyak benda budayanya tidak hanya dilakukan pada saat masa kekejaman *Khmer Merah* atau konflik yang dibawa oleh pihak lain untuk membuat negara dalam kondisi kacau sehingga memungkinkan penjarahan, tetapi sejarah juga menjadi saksi bahwa jumlah yang lebih besar dari benda-benda budaya dipindahkan

⁵³Cambodian genocide diunggah pada tahun 2015 dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zUVbvO2GiOUJ:worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/cambodian-genocide+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id> di akses pada tanggal 26 juni 2016 pukul 08.00 WITA.

keluar wilayah ini adalah sewaktu periode kamboja dikuasai oleh Perancis. Selama waktu itu, masyarakat Kamboja menyaksikan barang-barang antik yang dirusak dan dipindah tempatkan tanpa berani protes atau mencoba untuk mencegahnya. Hal tersebut dikarenakan Perancis memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan apapun yang mereka pilih.

Kamboja yang merupakan bagian dari masyarakat internasional, menunjukkan kecintaannya terhadap warisan budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari bendera negara ini, masyarakat Kamboja sangat menghormati warisan budaya mereka. nilai-nilai budaya Kamboja untuk hierarki, warisan kolektif, dan keturunan telah mempengaruhi seni dan arsitektur negara ini. Lebih khusus, seni dan arsitektur dari Kekaisaran *Khmer* dirancang untuk mencerminkan kekaisaran. Dengan demikian, referensi dari *Khmer* Era sangat mempengaruhi identitas budaya Kamboja. Hampir selama dua milenium, Kamboja mengembangkan kepercayaan *Khmer* yang merupakan gabungan antara kepercayaan Animisme, Agama Buddha, dan Agama Hindu. Dengan melihat bagaimana masyarakat kamboja menghormati dan menjaga kebudayaannya, maka dalam hal ini pemerintah Kamboja juga memberikan perhatian lebih.

Dengan melihat bagaimana masyarakat kamboja menghormati dan menjaga kebudayaannya, maka dalam hal ini pemerintah Kamboja juga memberikan perhatian lebih. Pemerintah Kamboja telah melakukan usaha dalam rangka untuk melindungi warisan budaya, tetapi meskipun demikian, kegiatan pencurian, penyelundupan dan penghancuran situs

arkeologi terus terjadi.⁵⁴ Beberapa dekade terakhir telah menunjukkan bahwa warisan budaya yang luar biasa ini telah mengalami pencurian dan penyelundupan secara ilegal keluar dari wilayah negara kamboja sehingga hal ini termasuk dalam kejahatan transnasional. Selain itu, bidang pariwisata yang merupakan salah satu pendapatan utama negara ini untuk menunjang ekonomi juga dimanfaatkan oleh para pelaku sehingga memberikan kontribusi terhadap fenomena penyelundupan yang menyebabkan kerusakan benda budaya.

Tabel 1 *Red List of Cambodian Antiquities at Risk*

No	Material	Periods			
		Pre History (From 5th Century B.C. to 5th Century A.D.)	Pre Angkor (From 6th to 8th Centuries A.D.)	Angkor (From 9th To 13th Centuries A.D.)	Post Angkor (From 14th To Early 20th Centuries A.D.)
1	Stone	(3) Adzes, Beads, Bead	(7) Linga, Head of Budha, Visnu, Ganesha, Lintel, Lintel and Columns, Steel with Nandin the Bull on a Lotus.	(7) Female Divinity, Shiva and Ganga, Balustrade Naga and Garuda, Lokeshvara, Lintel, Stele, Grinding Stone	(1) Sima
2	Metal	(3) Bell, Drum, Bangles	(2) Lokeshvara, Bull Shiva's Mount	(7) Palanquin Hooks, Ritual Bell, Vajra, Ring, Betel, Kneeling Female Figure	(6) Ladle, Lime Pot, Utensils, Draggar, Buddha, Popil.
3	Organic Material	-	-	-	(3) Wooden Carved, Keeling Worhipper, Manuscript
4	Ceramic and Glasess	(3) Pot, Epaulette, Beads	-	(3) Ceramics , Roof Tiles	(1) Jar

Sumber : Diolah berdasarkan sumber dari *Red List of Cambodian Antiquities at Risk* ICOM (*Internantional Council Of Museum*) tahun 2003.

Daftar Merah Kamboja *Antiquities in risk* adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan membantu melawan pencurian dan

⁵⁴*Preah vihear dispute cambodia- thailand* diunggah pada tanggal 1 januari 2011 <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/print/features/2011/01/01/feature-16> diakses pada hari Rabu 16Maret 2015.

penyelundupan benda budaya di Kamboja.⁵⁵ Daftar Merah ini telah dikembangkan untuk membantu museum, kolektor, dealer dalam seni dan barang antik, dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengenali benda-benda yang mungkin telah dijarah dan diselundupkan kemudian diekspor keluar dari Kamboja. Untuk memfasilitasi ini, Daftar yang menggambarkan dan menjelaskan beberapa kategori objek beresiko yang diperdagangkan di pasar barang antik. Benda-benda ini dilindungi oleh hukum Kamboja melarang penjualan dan ekspor mereka.

D. United States – Cambodia Cultural Property Agreement

Amerika Serikat merupakan salah satu dari 115 negara anggota yang berpartisipasi dalam pembuatan konvensi yang diadopsi oleh UNESCO pada tanggal 14 November 1970 mengenai *protection* terhadap benda-benda budaya yang bunyinya “*Means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property*”. Pada tahun 1972, Senat Amerika Serikat memberikan persetujuan penuh terhadap Konvensi UNESCO 1970. Namun, Konvensi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum yang berlaku di Amerika Serikat, maka undang-undang khusus sangat diperlukan agar memungkinkan Amerika Serikat untuk menerapkannya. Pada tahun 1982,

⁵⁵ICOM, *Red List of Cambodian Antiquities at Risk* 9 februari 2010 dalam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sY41OtNbcWIJ:archives.icom.museum/press/100209_Cambodian_Red_List_Press_file_EN.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 20 maret 2016

Kongres meloloskan *Convention on Cultural Property Implementation Act* dan Presiden Ronald Reagan menandatangani dan menjadikannya undang-undang pada bulan Januari 1983⁵⁶.

Secara singkat, Amerika yang menjadi salah satu anggota Konvensi berjanji untuk berusaha dengan maksimal mengurangi adanya kegiatan impor kekayaan budaya yang diperoleh melalui hasil pencurian dari museum atau monumen publik agama negara lain. Konvensi ini memungkinkan setiap negara yang memiliki warisan budaya yang mengalami kasus penjarahan untuk meminta bantuan dari negara lain bantuan tersebut bisa berupa melakukan langkah-langkah seperti kontrol ekspor, impor, dan perdagangan internasional terhadap benda-benda budaya.

Kamboja menyadari bahwa saat ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua Negara. Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Sedangkan *Trafficking in cultural property* atau kejahatan terhadap benda seni budaya merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam 18 jenis kejahatan transnasional oleh PBB. Kejahatan ini merupakan bentuk dari kegiatan pencurian atau penyelundupan benda-benda seni dari satu negara ke Negara lainnya. maka

⁵⁶*Process and Purpose* <http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/process-and-purpose> diakses pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.07 WITA.

dalam usaha untuk menjaga dan melestarikan *cultural property*-nya Kamboja melakukan beberapa usaha dan salah satunya ialah dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat, dalam hal ini dijelaskan pada *Momernandum Of Understanding Between the Government of the United States of America And the Government of the Kingdom of Cambodia*. MOU kedua negara ini di tanda tangani pada tanggal 10 september 2003 di Phnom Phen⁵⁷.

Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing masing negara.bahwa negara satu dengan negara lain yang menjalin kerjasama memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut yang saat ini membuat negara memiliki sifat saling ketergantungan antara satu sama lain. Hubungan yang telah terjalin antara amerika Serikat dan cambodia merupakan salah satu contoh hubungan yang timbul karena adanya kebutuhan dimana masing-masing negara mendapatkan keuntungan bagi negaranya.

⁵⁷*U.S-Cambodia Cultural Peoperty Agreement*.<http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/bilateral-agreements/cambodia/us-cambodia> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.

BAB IV

PERANAN *UNITED STATES – CAMBODIA CULTURAL PROPERTY AGREEMENT* DALAM MENGATASI *TRAFFICKING IN CULTURAL PROPERTY* DI KAMBOJA

A. Kepentingan nasional Amerika Serikat dan Kamboja dalam kerja sama *United States – Cambodia Cultural Property Agreement*

Pada tahun 1960, masalah penjarahan terhadap kekayaan budaya menjadi perhatian besar bagi negara-negara anggota UNESCO. Secara konsep, kejahatan tersebut atau lebih dikenal dengan *Trafficking in Cultural Property* masuk dalam kategori *Transnational Crime* yang merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara⁵⁸. Adapun Negara yang paling berisiko mengalami kasus ini adalah negara yang kaya akan budaya tetapi memiliki sumber daya yang terbatas untuk melindungi warisan nasional mereka. Namun, saat ini semua negara beresiko karena kejahatan ini telah menyebabkan berkurangnya perlindungan terhadap sumber informasi penting tentang budaya di seluruh dunia.

Tujuan jangka panjang dari Konvensi UNESCO tahun 1970 adalah untuk memberikan pengetahuan serta pembelajaran ilmiah maupun informasi dan studi mengenai materi arkeologi, agar masyarakat dunia paham dan kemudian menyadari pentingnya melestarikan warisan budaya. Manfaat dari kerjasama internasional dalam Konvensi UNESCO 1970 adalah pemahaman yang lebih besar dari warisan dan pentingnya melindungi itu.⁵⁹

⁵⁸Katherine Teilmann and Malcolm Klein, *Loc.Cit*

⁵⁹Lyndel V.Proot dan Patrick J'Okefee, 1988. *Handbook of national regulations concerning the export of cultural property* hal 229

Pada tahun 1972, Senat Amerika Serikat memberi saran dan persetujuan terhadap Konvensi UNESCO 1970. Namun, karena Konvensi tersebut tidak memiliki dasar hukum AS, maka diperlukan undang-undang khusus yang kemudian memungkinkan AS untuk menerapkannya. Pada tahun 1982, Kongres meloloskan Konvensi Pelaksanaan Properti Budaya Undang-Undang, Presiden Ronald Reagan menandatangani menjadi undang-undang pada bulan Januari 1983⁶⁰. Undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah AS untuk menerapkan dan bertindak secara Hukum pada pelaku kejahatan terhadap benda budaya. Amerika Serikat yang menjadi anggota Konvensi berjanji untuk melarang segala bentuk impor kekayaan budaya yang dicuri dan diselundupkan dari museum atau monumen publik agama negara lain. Pasal 9 Konvensi memungkinkan untuk setiap Negara yang memiliki warisan budaya dan berada dalam bahaya dari penjarahan untuk dapat meminta bantuan dari Negara lain agar melakukan langkah-langkah seperti kontrol ekspor, impor, dan perdagangan internasional terhadap benda budaya yang dilindungi.

Ketika Senat Amerika Serikat menyusun rancangan undang-undang, bukti yang diberikan dalam berbagai forum Kongres di beberapa tahun terakhir menjelaskan bahwa kejahatan terhadap warisan budaya telah mengakibatkan kehancuran yang sulit untuk diperbaiki terhadap situs arkeologi, hal tersebut kemudian merusak warisan budaya yang selain menjadi

⁶⁰U.S. SENATE REPORT, 97-564 *Implementing Legislation For The Convention On The Means Of Prohibiting And Preventing The Illicit Import, Export, And Transfer Of Ownership Of Cultural Property* dalam <https://eca.state.gov/files/bureau/97-564.pdf> diakses pada tanggal 23 juli 2016 pukul 16.00 WITA

simbol juga merupakan sumber pengetahuan dunia yang sangat berharga dan secara turun temurun berasal dari masa lalu. Selanjutnya, karena AS adalah pasar utama untuk penjualan benda-benda arkeologi atau etnologis dan benda-benda seni budaya yang diekspor secara ilegal maka hal tersebut membuat AS mendapatkan masalah dengan negara-negara asal dari benda benda budaya tersebut dan seringkali kondisi ini terjadi di antara negara sekutu, Seperti yang dinyatakan oleh Departemen Luar Negeri:

The legislation is important to our foreign relations, including our international cultural relations. The expanding worldwide trade in objects of archaeological and ethnological interest has led to wholesale depredations in some countries, resulting in the mutilation of ceremonial centers and archaeological complexes of ancient civilizations and the removal of stone sculptures and reliefs. In addition, art objects have been stolen in increasing quantities from museums, churches, and collections. The governments which have been victimized have been disturbed at the outflow of these objects to foreign lands, and the appearance in the United States of objects has often given rise to outcries and urgent requests for return by other counties. The United States considers that on grounds of principle, good foreign relations, and concern for the preservation of the cultural heritage of mankind, it should render assistance in these situations⁶¹

Undang-undang ini kemudian menjadi penting untuk amerika serikat agar dapat menjaga hubungan luar negeri, termasuk hubungan budaya internasionalnya. Perdagangan benda benda arkeologi di seluruh dunia berkembang dan menyebabkan penghancuran warisan budaya di beberapa negara, banyak terjadi pengrusakan di kompleks arkeologi dari peradaban kuno seperti pencurian patung dan relief. Selain itu, benda-benda seni telah dicuri akan diselundupkan keluar dari negara asal dan di import kenegara

⁶¹Ibid

negara besar dimana terdapat pihak pihak yang bersedia mengeluarkan biaya untuk membeli benda budaya tersebut.⁶²Setelah bertahun tahun seringkali benda budaya yang telah diselundupkan kemudian ditemukan di Amerika Serikat.Hal ini membuat pemerintah AS mendapatkan permintaan mendesak untuk segera mengembalikan benda budaya ke negara asalnya.

Amerika Serikat meyakini bahwa Multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya (*cultural pluralism*) dengan menekankan kesederajatan-kebudayaan yang ada pada sebuah masyarakat. Untuk itulah, ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Dalam konteks sebuah masyarakat permasalahan tersebut tentunya tidak akan lepas dari sebuah perbedaan.

Amerika Serikat menganggap masalah ini sangat penting untuk segera di tangani dengan melihat kepentingan nasional untuk tetap menjaga hubungan luar negeri yang baik khususnya dengan negara sekutu, dan kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya umat manusia.AS telah dengan aktif melakukan usaha-usaha untuk melestarikan warisan budaya seperti melakukan hubungan bilateral dengan beberapa negara yang

⁶²Joris Kila, *Cultural Heritage in the Crosshairs, Protecting Cultural Property During Conflict*, Leiden : Boston 2013. Hal 34-35.

seringkali mengalami kejahatan terhadap warisan budayanya, salah satunya ialah Kamboja.

Kamboja dengan sangat jelas memperlihatkan kepada masyarakat internasional bahwa negara ini sangat mencintai dan menghormati kebudayaannya dengan menggunakan gambar dari kuil *Angkor Wat* pada benderanya. Kamboja memiliki banyak kekayaan benda budaya dan dengan keterbatasan pemerintah melindungi warisan budaya, terlebih ketika terjadi konflik maka kamboja merupakan salah satu negara yang sering mengalami kejahatan terhadap benda budaya berupa pencurian dan kemudian diselundupkan secara ilegal keluar dari batas wilayah kamboja.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan merupakan sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Masyarakat Kamboja yang sadar akan hal tersebut meminta benda-benda budaya yang diselundupkan harus dikembalikan ke situs aslinya⁶³. Mereka meyakini bahwa benda-benda budaya yang menjadi simbol adat dan agama telah dijarah demi mendapatkan keuntungan untuk pihak lain, maka pemerintah harus berusaha agar warisan budaya itu dikembali ke negara asalnya.

Membawa benda budaya kembali ke dalam wilayah kamboja sangat berarti banyak untuk masyarakat kamboja sendiri. Pertama, memulihkan

⁶³Greenfield Jeanette *Op. Cit* hal 198.

bagian dari semangat dan jiwa pada masyarakat Kamboja yang telah hilang. Kedua, Kerajaan yang merupakan simbol negara ini telah rusak dikarenakan banyaknya barang antik yang hilang sehingga warisan nya tersebar di seluruh dunia⁶⁴. Membawa artefak berharga kembali ke asalnya membantu menyembuhkan jiwa masyarakat Kamboja, mengembalikan warisan dan memasang kembali budaya mereka. Yang pada akhirnya patung kembali berfungsi sebagai sarana beribadah dan untuk mengajar generasi muda dan masyarakat Kamboja secara umum tentang nilai-nilai kebudayaan mereka, warisan budaya, properti, sejarah dan identitas.

Kembalinya benda seni bersejarah yang masih di luar negeri akan memacu generasi muda Kamboja untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya negara itu agar dapat memperkaya pengetahuan kehidupan anak-anak dan cucu mereka. Singkatnya, Kamboja adalah pemilik sebenarnya dari semua benda-benda budaya yang diselundupkan, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan kembali.

Setelah bertahun-tahun pasca konflik, pemerintah kamboja melakukan usaha –usaha dengan aktif agar mereka bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi miliki mereka, yakni kamboja berusaha untuk membawa warisan budaya mereka yang telah diselundupkan untuk kembali ke negara ini. Dengan menjadi anggota UNESCO, Kamboja telah mendaftarkan warisan budayanya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan perlindungan agar warisan yang telah terdaftar akan diestarikan tidak hanya oleh masyarakat kamboja

⁶⁴David J Steinbeirg & Herbert Harold Vreeland, *Loc.Cit.*

tetapi oleh masyarakat internasional. Selain itu untuk menjaga warisan budayanya kamboja melakukan usaha lain seperti kerjasama atau hubungan bilateral yang dilakukan dengan Amerika Serikat.

Dalam hubungan bilateral, negara satu dengan negara lain yang menjalin kerjasama memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut yang saat ini membuat negara memiliki sifat saling ketergantungan antara satu sama lain. Hubungan yang telah terjalin antara Amerika Serikat dan kamboja merupakan salah satu contoh hubungan yang timbul karena adanya kebutuhan dimana masing-masing negara mendapatkan keuntungan untuk kepentingan nasionalnya.

Pada kerjasama ini ditekankan pada usaha usaha yang harus kedua negara lakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan warisan budaya. Keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Sehingga *national interest* tiap negara berbeda karena sangat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya, bahkan *history* yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara ingin melakukan kerjasama, hal ini juga mempengaruhi Amerika Serikat dan Kamboja yang menjalin kerja sama walaupun dari segi demografi, karakter, budaya, bahkan *history* yang dimiliki kedua Negara sangat berbeda tetapi kebutuhan yang menyangkut masalah kebudayaan ini membuahkan sebuah MOU.

Dibalik kerjasama ini dapat diketahui bahwa kepentingan Amerika Serikat dan Kamboja berbeda yakni:

1. Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam *United States – Cambodia Cultural Property Agreement*

a) Menjaga hubungan luar negeridan mengurangi kemungkinan adanya konflik dengan negara-negara yang mengalami kejahatan terhadap benda budaya.

Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya dengan sistem pemerintahan republik federal ini telah menjadi negara yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan memiliki kekuatan politik serta teknologi yang tinggi. Pasca-Perang Dunia II dan Perang Dingin, negara ini terus maju menjadi negara yang menguasai perindustrian, bahkan pengaruh negara ini semakin luas hingga menjadi pusat teknologi dunia setelah pecahnya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Dan setelah Uni Soviet sebagai Blok Timur mengalami keruntuhan, Amerika Serikat sebagai Blok Barat secara otomatis atau saat itu juga menduduki posisi tertinggi yaitu sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Dalam sepekan terangnya pasca-Perang Dingin tersebut, Amerika Serikat terus berinovasi pada bidang teknologi, seperti komputer, internet, senjata nuklir, kapal terbang, dan perjalanan luar angkasa serta banyak lagi keberhasilan-keberhasilan Amerika Serikat yang dapat disaksikan saat itu.

Sebagai negara adidaya maka Amerika Serikat perlu untuk menjaga hubungan luar negerinya, dengan adanya kasus trafficking in

cultural property ini, AS kemudian menjadi salah satu dari negara tujuan penjualan benda-benda arkeologi yang didapatkan secara ilegal. Hal ini kemudian sangat berdampak pada hubungan AS dengan negara-negara asal benda-benda arkeologi tersebut.

Hubungan luar negeri suatu negara banyak dipengaruhi oleh politik luar negerinya dan juga kebijakan luar negerinya. Politik luar negeri biasanya mengarah kepada kepentingan-kepentingan yang hendak dicapainya. Begitu pula dengan Amerika yang berusaha mencapai kepentingannya melalui berhubungan dengan negara-negara lain.

Dalam hubungan luar negerinya, Amerika Serikat yang notebene memiliki sejumlah kapabilitas aset-aset militer, politik, diplomatik dan ekonomi membuat Amerika menjadi negara yang *defensive player* dalam masalah internasional. Amerika Serikat memilih untuk melibatkan diri didalamnya dan menerapkan kebijakannya berdasarkan orientasi, peran, tujuan-tujuan politik luar negeri dan tindakannya di dalam sistem internasional dengan segala kapabilitas, pengaruh, kekuatan, hubungan-hubungannya yang dimiliki Amerika Serikat dengan negara lain.

Amerika Serikat melakukan kerjasama di bidang budaya tidak hanya dengan Kamboja tetapi juga terhadap beberapa negara lain yang sangat rentan mengalami pengrusakan atau kejahatan terhadap benda atau warisan budayanya seperti Bolivia, Bulgaria, Cambodia, China, Colombia, Cyprus, El Salvador, Greece, Guatemala, Honduras, Italy,

Mali, Nicaragua, Dan Peru. Hubungan luar negeri Amerika Serikat banyak dipengaruhi oleh tujuan dasar dari politik luar negerinya paska Perang Dingin yang menyatakan bahwa Amerika Serikat harus menjaga posisi *primacy* Amerika Serikat yang tak terganggu untuk memastikan *globalorder* dan *balance of power* diberbagai di dunia.

b) Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan dari Trafficking In Cultural Property.

Mengembalikan benda-benda budaya yang diselundupkan karena Amerika Serikat merupakan negara tujuan dari kegiatan tersebut. Para pelaku kejahatan terhadap benda budaya menjadikan amerika sebagai lokasi tujuan dari benda-benda yang secara ilegal diselundupkan keluar dari batas wilayah negara, hal ini dikarenakan banyaknya museum museum ataupun kolektor yang secara finansial mampu membeli dengan harga yang tinggi tanpa memperhatikan bahwa benda tersebut diperoleh dengan cara ilegal.

Globalisasi perekonomian dunia yang terjadi sejak dekade terakhir abad 20, telah menjadikan perdagangan barang dan lalu lintas modal bebas hambatan antar negara (*borderless*). Bukan itu saja, lalu lintas sumber daya manusiapun tidak ada hambatan lagi. Globalisasi ini didorong oleh adanya interaksi antara teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan komunikasi dari jarak jauh melalui jaringan internet dan sarana komunikasi lainnya. Globalisasi

mengakibatkan persaingan yang semakin ketat di pasar global, yang pada gilirannya akan menuntut peningkatan daya saing dari setiap pelaku ekonomi dari berbagai negara.

Perkembangan era globalisasi memiliki peran dalam munculnya kejahatan transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara membuat kejahatan transnasional meningkat secara dramatis. Hal yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional ialah adanya barang-barang tertentu yang tersedia di beberapa negara dan tidak tersedia pada negara lain, atau adanya perbedaan harga membuat penyelundupan benda-benda budaya menjadi sangat menguntungkan. Dengan alasan tersebut dan dengan adanya peluang transportasi yang meningkat maka hal ini dapat membuat arus perdagangan kejahatan transnasional lebih mudah. Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Para pelaku kejahatan terhadap benda budaya menjadikan Amerika sebagai lokasi tujuan dari benda-benda yang secara ilegal diselundupkan keluar dari batas wilayah negara, hal ini dikarenakan banyaknya museum museum ataupun kolektor yang secara finansial mampu membeli dengan harga yang tinggi tanpa memperhatikan bahwa benda tersebut diperoleh dengan cara ilegal.

c) Menjalankan tugas anggota UNESCO untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan dunia.

UNESCO (*The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) merupakan suatu badan organisasi PBB yang bertanggung jawab dalam mempromosikan perdamaian, keadilan sosial, HAM dan keamanan internasional yang bekerja sama dengan dunia pendidikan internasional, program ilmu pengetahuan dan budaya. UNESCO bermarkas di Paris, Prancis dan memiliki lebih dari 50 kantor yang tersebar di seluruh dunia. Pada tanggal 16 November 1945, 37 negara peserta mendirikan UNESCO dengan Konstitusi UNESCO yang mulai berlaku dari tanggal 4 November 1946 setelah diratifikasi. Konferensi Umum UNESCO pertama diadakan di Paris pada tanggal 19 November-10 Desember 1946 yang diikuti 30 negara peserta. Sejak saat itu, UNESCO berkembang sangat signifikan di seluruh dunia dan jumlah negara berpartisipasi menjadi anggota juga bertambah menjadi 195 negara (termasuk 193 negara anggota PBB kecuali Liechtenstein) dan 9 negara anggota asosiasi (negara non-independen) yaitu Anguilla, Aruba, British Virgin Island, Cayman Island, Curacao, Faroes, Macao (China), Sint Maarten dan Tokelau.

Masyarakat Amerika merupakan masyarakat yang sangat heterogen yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Oleh karena itu, kebudayaannya pun sangat beragam. Penduduk asli Amerika adalah bangsa Eskimo dan Indian. Pendatang Amerika sebagian besar berasal

dari Eropa, seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol. Selain itu, pendatang berasal dari seluruh penjuru dunia. Budaya Amerika pada dasarnya dilandasi oleh ideologi atau paham kebebasan. Setiap individu bebas mengekspresikan sikapnya selama tidak mengganggu kepentingan orang lain. Contoh kebebasan tersebut antara lain kebebasan bersaing, menyampaikan pendapat, dan gaya hidup sehari-hari. Amerika Serikat merupakan salah satu dari 115 negara anggota yang berpartisipasi dalam pembuatan konvensi yang diadopsi oleh UNESCO pada tanggal 14 November 1970 mengenai *protection* terhadap benda-benda budaya.

Adanya konvensi ini membuat negara-negara anggota bekerja sama untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti pencurian dan penyelundupan benda-benda arkeologi dan etnologis budaya secara signifikan. Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu anggota yang sangat berperan aktif karena negara ini menjadi salah satu negara tujuan benda-benda budaya yang didapatkan secara ilegal. Pada tahun 1972, Senat Amerika Serikat memberikan persetujuan penuh terhadap Konvensi UNESCO 1970. Namun, Konvensi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum yang berlaku di Amerika Serikat, maka undang-undang khusus sangat diperlukan agar memungkinkan Amerika Serikat untuk menerapkannya. Pada tahun 1982, Kongres meloloskan *Convention on Cultural Property Implementation Act* dan Presiden Ronald Reagan menandatangani dan

menjadikannya undang-undang pada bulan Januari 1983. Amerika yang menjadi salah satu anggota Konvensi berjanji untuk berusaha dengan maksimal mengurangi adanya kegiatan impor kekayaan budaya yang diperoleh melalui hasil pencurian dari museum atau monumen publik agama negara lain. Konvensi ini memungkinkan setiap negara yang memiliki warisan budaya yang mengalami kasus penjarahan untuk meminta bantuan dari negara lain bantuan tersebut bisa berupa melakukan langkah-langkah seperti kontrol ekspor, impor, dan perdagangan internasional terhadap benda-benda budaya.

2. Kepentingan Nasional Kamboja dalam *United States – Cambodia Cultural Property Agreement*

a) Warisan budaya yang merupakan simbol dan kepercayaan bagi masyarakat Kamboja untuk dikembalikan.

Warisan budaya di kamboja tidak hanya dijadikan pajangan akan tetapi berfungsi sebagai alat untuk mengajar generasi muda dan masyarakat Kamboja secara umum tentang nilai mereka warisan budaya, properti, sejarah dan identitas. Kamboja yang merupakan bagian dari masyarakat internasional, menunjukkan kecintaannya terhadap warisan budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari bendera negara ini, masyarakat Kamboja sangat menghormati warisan budaya mereka. Agama menjadi sumber inspirasi utama bagi kebudayaan di Negara ini. Hampir selama dua milenium, Kamboja mengembangkan kepercayaan *Khmer* yang merupakan gabungan antara kepercayaan

Animisme, Agama Buddha, dan Agama Hindu. Setelah bertahun-tahun sejak kejadian tersebut maka masyarakat Kamboja meminta benda-benda budaya yang diselundupkan harus dikembalikan ke situs aslinya. Jika benda-benda ini dijarah untuk keuntungan, mereka harus dikembalikan ke negara asalnya.

b) Salah satu usaha Pemerintah Kamboja untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya.

Dengan melakukan kerjasama ini maka pemerintah Kamboja telah melakukan usaha untuk melestarikan warisan budayanya yang merupakan bagian dari upaya menyeluruh terhadap strategi berkelanjutan pemerintah untuk melindungi sumber daya budaya. Warisan budaya yang lahir dari kebudayaan *Khmer* di Kamboja menjadi simbol dan identitas yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan banyaknya kasus-kasus *trafficking* pada benda-benda budaya di Kamboja maka pemerintah Kamboja memberikan perhatian lebih agar proses pengembalian patung-patung ini bisa terjadi. Dengan melihat bagaimana masyarakat Kamboja menghormati dan menjaga kebudayaannya, maka dalam hal ini pemerintah Kamboja juga memberikan perhatian lebih. Dapat dilihat bagaimana pemerintah Kamboja berperan ketika terjadi konflik dengan Thailand pada konflik candi *Preah Vihear* dan banyaknya kasus *trafficking* pada benda-benda kebudayaan di Kamboja.

Dengan dikembailkannya warisan budaya yang secara ilegal dirampas maka hal ini akan menjadi cerminan untuk masyarakat Kamboja agar lebih peduli untuk menjaga dan melestarikan warisan budayanya, karena selain usaha pemerintah juga dibutuhkan peran aktif dari masyarakat kamboja sendiri.

c) Menjalankan tugas anggota UNESCO untuk berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan warisan dunia.

Memperlihatkan pada masyarakat internasional bahwa Kamboja merupakan salah satu anggota UNESCO yang berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan warisan dunia. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan Kamboja dengan Amerika serikat maka pemerintah Kamboja telah memperlihatkan bahwa negara ini peduli dan akan berusaha untuk menjaga warisan budayanya sekaligus menjaga kerjasama baik itu secara bilateral maupun multikateral, Terutama dengan negara-negara tetangga, untuk melakukan usaha perlindungan warisan budaya, karena pemerintah menyadari bahwa batas-batas politik dan batas-batas budaya suatu negara tidak lagi menjadi hal yang sulit dilalui dalam kegiatan kejahatan transnasional.

Kamboja menyadari bahwa saat ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua

negara, *Transnational crime* merupakan kejahatan yang mempunyai dampak melewati batas teritorial suatu Negara, kejahatan transnasional dapat dilakukan oleh individual atau kelompok secara terorganisir. Batasan definisi dan klasifikasi dari kejahatan internasional menunjukkan adanya unsur lintas batas atau menyangkut kepentingan bukan hanya domestik dari suatu negara, tetapi juga kepentingan negara lain. Maka dalam usaha untuk menjaga dan melestarikan *cultural property*-nya Kamboja melakukan beberapa usaha dan salah satunya ialah dengan melakukan kerja sama.

Berdasarkan poin poin kepentingan nasional kedua negara, penulis dapat memaparkan bahwa cara pandang kedua negara ini berbeda terkait permasalahan kejahatan terhadap benda budaya khususnya yang ada di kamboja. Sejak awal Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membuat undang-undang mengenai perlindungan terhadap warisan budaya, Presiden Ronald Reagan menandatangani menjadi undang-undang pada bulan Januari 1983. Undang-undang memungkinkan pemerintah AS untuk menerapkan konvensi perlindungan terhadap benda budaya yaitu Pasal 7 (b) (1) dan 9. dikarenakan banyaknya permintaan untuk artefak budaya yang mengakibatkan kerusakan pada situs arkeologi, hilangnya informasi yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan budaya seiring dengan semakin banyaknya benda budaya yang dipindahkan secara ilegal. Amerika serikat selaku pasar utama benda purbakala dan arkeolog

menjadi negara tujuan dari benda-benda budaya yang dipindahkan secara ilegal kemudian kondisi ini menyebabkan negara ini harus berurusan dengan negara asal benda-benda tersebut, hal inipun memperburuk hubungan bilateral Amerika Serikat dengan setiap negara asal.

Adapun kamboja sebagai negara asal setelah melewati masa masa sulit dan kondisi negaranya mulai membaik, masyarakat Kamboja menyadari banyaknya warisan budaya di situs arkeolog yang hilang sehingga meminta pemerintah untuk segera melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan kembali apa yang telah diambil dari negara ini. Karena untuk masyarakat kamboja sendiri warisan budaya mereka tidak dapat dinilai secara ekonomi karena hal tersebut merupakan simbol dari adat dan agama yang secara turun temurun di berikan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Selain perbedaan tersebut penulis juga melihat adanya kesamaan dari tujuan kedua negara ini, Amerika Serikat dan Kamboja merupakan anggota dari UNESCO dengan kata lain MOU yang dibuat oleh kedua negara ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong program dari UNESCO yaitu untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya dunia. Walaupun kedua negara ini berada diposisi berbeda dimana Amerika Serikat merupakan negara tujuan dan Kamboja merupakan negara asal tetapi kedua negara ini memiliki pandangan yang sama yakni untuk mengembalikan benda-benda budaya yang didapatkan secara ilegal ke

negara asalnya. Hal ini dilakukan bertujuan agar warisan budaya dunia bisa tetap dijaga kelestariannya.

Sejak peramh dunia II masyarakat internasional semakin menyadari akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya. Respon masyarakat internasional terhadap pemberitaan dikembalikannya beberapa patung dari Amerika Serikat ke Kamboja sangat bagus, untuk Amerika Serikat sendiri sebagai negara tujuan mendapat respon yang sangat baik karna sebai negara superpower, Amerika Serikat dinilai peduli terhadap perlindungan terhadap benda-benda budaya dimana beberapa negara lain tidak menganggap hal ini penting untuk diperhitungkan. Sedangkan untuk Kamboja sebagai negara asal akan mendapat respon yang baik karena sebagai negara asal yang memiliki kekayaan warisan budaya, pemerintah negara ini dianggap bertanggung jawab terhadap hal milik negara yang membutuhkan perlindungan.

B. Bentuk pelaksanaan dari *United States – Cambodia Cultural Property Agreement*

Dalam Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang terjadi di masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola interaksi hubungan ini yakni berupa kerjasama (*Coorporation*). Menurut bentuknya kerjasama antar negara terdiri atas kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral mengacu pada hubungan saling mempengaruhi antara dua

negara. Terdapat beberapa manfaat dalam mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain, dimana manfaat yang ingin diperoleh tergantung dari kepentingan nasional setiap negara yang mengadakan kerjasama. Adanya perbedaan kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara sering menjadi pemicu ketegangan atau bahkan konflik antar negara sehingga dalam hubungan internasional diperlukan adanya kerjasama kerjasama yang melibatkan dua negara baik itu di bidang budaya, ekonomi, politik, militer, dan pertahanan keamanan.

Momerandum Of Understanding mengenai perlindungan terhadap benda budaya yang ditanda tangani oleh Amerika Serikat dan Kamboja merupakan sebuah kerjasama atau perjanjian internasional yang didasari oleh konvensi UNESCO tahun 1970 yang berbunyi *Means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property*. UNESCO, selaku pihak yang berwenang melakukan kegiatan perlindungan suatu kekayaan budaya dunia. Badan internasional ini berusaha untuk mendorong negara-negara terbangun kesadarannya untuk kemudian menjadi negara peserta perjanjian-perjanjian internasional dalam lingkup perlindungan maupun penghukuman terhadap kejahatan perusakan benda budaya dunia. Seperti pada Protokol II, dan Konvensi UNESCO 1972.

UNESCO memiliki lima program utama yaitu Pendidikan, Ilmu Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Bumi, Ilmu Sosial dan Manusia, Budaya serta Komunikasi dan Informasi. Program Pendidikan meliputi

pendidikan dasar untuk semua dengan penekanan pada keaksaraan, pencegahan HIV/AIDS dan pelatihan guru di sub-Sahara Afrika, meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh dunia serta pendidikan menengah, pendidikan teknologi dan pendidikan tinggi. Program Ilmu Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Bumi meliputi perlindungan terhadap air dan kualitasnya, perlindungan terhadap laut, mempromosikan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan teknik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara maju dan berkembang, pengelolaan sumber daya dan kesiapsiagaan bencana. Program Ilmu Sosial dan manusia meliputi kegiatan mengenai isu-isu global seperti memerangi diskriminasi dan rasisme serta mempromosikan Hak Azasi Manusia. Program Budaya meliputi promosi tentang budaya termasuk pemeliharaan keanekaragaman budaya serta perlindungan warisan budaya. Program yang terakhir yaitu Komunikasi dan Informasi yang meliputi kebebasan memberikan berkreasi melalui kata-kata dan gambar untuk membangun komunitas di seluruh dunia agar saling berbagi pengetahuan dan memberdayakan masyarakat melalui akses informasi dan pengetahuan tentang studi yang berbeda.

MoU ini berisi poin-poin kerjasama yang akan dilakukan kedua negara dalam rangka untuk menjaga warisan budaya dunia. Salah satu usaha yang kedua negara lakukan ialah Pembatasan impor, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi insentif bagi pelaku kejahatan untuk menyelundupkan benda budaya yang didapatkan dengan cara ilegal. *Designated list* merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua negara

dalam MoU ini, dimana *designted list* berisikan jenis jenis atau bahan dari benda benda arkeologi yang secara khusus berasal dari kamboja. Pembatasan impor ini diberlakukan berdasarkan perjanjian antara Amerika Serikat dan Pemerintah Kerajaan Kamboja yang bersumber dari konvesi yang diadopsi oleh UNESCO pada tanggal 14 November 1970 mengenai *protection* terhadapbenda-benda budaya.

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam proses kerja sama ini merupakan kedua pemerintah yang bersangkutan dan juga museum-museum serta kolektor, yang dimaksud kolektor disini ialah Kolektor Seni internasional adalah individu yang membeli karya seni kebudayaan suatu negara. Biasanya para kolektor tersebut mengumpulkan benda-benda yang ia beli dan dipamerkannya dalam museum milik pengkolektor tersebut. Namun biasanya kolektor merupakan kelompok kecil yang sangat elit yang menikmati koleksi mereka untuk sendiri. Mereka mendapatkan benda-benda tersebut dengan cara apa saja, bahkan sampai membeli di pasar gelap.

Pada tanggal 26 Agustus 2008 “kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Mengenai Pengenaan Pembatasan Impor Material ArkeologiKamboja dari Zaman Perunggu hingga Era Khmer” hal ini menjelaskan bahwa terjadi perluasan pembatasan impor pada benda benda budaya di kamboja yang saat ini dilindungi perluasan tersebut dimulai dari Zaman Perunggu (c. 1500 SM-500 SM) sampai era khmer (c. 500 SM-550 M).

Adapun poin-poin kerjasama yang akan dilakukan kedua negara dalam *Momerandum Of Undersanding Between United States Of America And Cambodia* ialah,

Tabel 3 Bentuk Kerjasama Amerika Serikat – Kamboja

No	Bidang kerjasama	Bentuk kerjasama	
		Amerika serikat	Kamboja
1	Politik dan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amerika serikat akan membatasi kegiatan impor benda benda yang masuk dalam kategori materi arkeologi khmer, tertulis dalam <i>designted list</i>. 2. Pemerintah amerika serikat akan mengembalikan ke pemerinH kamboja jika terdapat benda benda yang termasuk dalam <i>designted list</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kerajaan Kamboja akan menggunakan upaya terbaik dalam mengatasi kegiatan pengerusakan dan pencurian dalam perbatasannya, dengan membuat kontrol ekspor yang lebih efektif 2. Pemerintah kamboja akan menjalin kerjasama dari negara-negara tetangga dan negara pengimpor lainnya untuk mengendalikan perdagangan gelap artefak budaya berasal di Kamboja.
2	Ekonomi dan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan upaya terbaik untuk memfasilitasi bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya budaya dan keamanan kepada Pemerintah Kerajaan Kamboja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kerajaan Kamboja akan berusaha untuk mengembangkan dan mempromosikan program pelatihan profesional untuk arkeolog, staf museum dan administrator lembaga publik yang bertanggung jawab untuk warisan budaya, serta untuk meningkatkan kemampuan dari <i>National Museum of Cambodia</i> untuk merawat dan melestarikan warisan budaya kamboja.
3	Budaya dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah amerika akan menggunakan upaya terbaik untuk melakukan pertukaran benda benda budaya untuk kebutuhan pendidikan dengan tujuan pertukaran pengetahuan dan informasi warisan budaya di mana kondisi pertukaran tersebut tidak membahayakan atau merusak warisan budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kerajaan Kamboja akan menggunakan upaya terbaik untuk mengembangkan program pendidikan antara populasi lokal di seluruh negeri sebagai bagian dari upaya menyeluruh terhadap strategi berkelanjutan untuk melindungi sumber daya budaya.

Sumber : *Momerandum Of Undersanding Between United States Of America And Cambodia* signed at Phnom Penh september 19, 2003.

Poin-poin kerjasama yang akan dilakukan kedua negara dalam *Momerandum Of Undersanding Between United States Of America And Cambodia* meliputi beberapa aspek yakni aspek Politik dan keamanan, Ekonomi dan pembangunan serta Budaya dan pendidikan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk kepentingan dari perjanjian ini maka kedua negara yang bertanda tangan dalam hal ini Amerika Serikat dan Kamboja harus melakukan upaya-upaya yang dapat melancarkan jalannya kerjasama ini.

Adapun untuk kondisi benda benda budaya yang telah dikembalikan ke negara asalnya, dalam perjanjian kerja sama ini juga djelaskan untuk bagaimana negara asal harus menjaga dan merawat benda-benda budaya tersebut agar digunakan untuk tujuan informasi, wawasan pendidikan tanpa membahayakan atau merusak benda budaya karena warisan budaya yang dimiliki negara asal bukan hanya milik masyarakat negara tersebut melainkan milik masyarakat internasional.

Kedua negara memiliki porsi yang sama dalam perjanjian ini, yang artinya posisi atau kedudukan kedua negara ini sama. Untuk mendapatkan keuntungan atau untuk memenuhi kepentingan nasional ang ingin dicapai oleh kedua negara maka poin-poin kerjasama ini harus dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Kamboja. Kerjasama bilateral ini mengacu pada hubungan saling mempengaruhi antara dua Negara. Hubungan bilateral yang dilakukan sebagai bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang

jauh diseberang lautan dengan sasaran utama menciptakan kerjasama politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.

Perjanjian ini berlaku selama lima tahun, dan dapat diperpanjang, mengikuti proses hukum dan dengan melakukan review yang dilakukan oleh Komite Penasehat Properti Budaya. MoU Amerika Serikat dan Kamboja mengalami perubahan atau amandemen sekitar dua kali semenjak pertama kali dikeluarkan pada 2003. Amandemen ini dikeluarkan pada 2008 dan 2013. Perubahan ini dilakukan setelah melihat 5 tahun pertama MOU dijalankan. Amandemen yang dilakukan pada tahun 2008 tidak memiliki adanya perubahan yang signifikan, hanya perbaikan di beberapa kalimat, seperti pada bagian judul, dimana awalnya *“Memorandum of Understanding Between the Government of the United States of america and the Government of The Kingdom of Cambodia Corncerning the Imposition of Import Restriction on Khmer Archeogolical Material”* yang kemudian diubah menjadi *“Memorandum of Understanding Between the Government of the United States of america and the Government of The Kingdom of Cambodia Corncerning the Imposition of Import Restriction on Archeogolical Material from Cambodia from the Bronze Age through Khmer Era”*. Dalam amandemen ini, terdapat beberapa perbaikan kalimat pada bagian pembukaan dan pasal 1. Sedangkan pada pasal 2 ditambahkan beberapa bagian, misalnya pada poin F di pasal ini diberikan penjelasan lebih lanjut tentang usaha-usaha yang harus dilakukan AS dan Kamboja untuk mengembalikan benda-

benda budaya yang telah hilang tersebut. Selain itu, Poin I dan J yang sebelumnya tercantum dalam MoU 2003, dihapuskan pada amandemen 2008 ini. Amandemen ini dirasa penting, karena perubahan yang terjadi membuat kerjasama diantara kedua negara ini lebih fokus. Dari *bronze stone* ke zaman khmer dimana dapat dengan mudah dikelompokkan benda budaya yang ada dari masa itu ke masa itu.

Pada tahun 2013, amandemen kembali dilakukan. Berbeda dengan amandemen sebelumnya, pada amandemen 2013 ini Amerika Serikat dan Kamboja merombak penuh pasal 2 dan membuatnya menjadi lebih terinci. Hal ini terlihat dari mulai adanya pembagian poin-poin pokok dalam MoU seperti, sasaran, tata cara perlindungan dan konservasi, kolaborasi dan pertukaran benda-benda budaya, kekuatan hukum, dan pelaporan. Pada MoU 2008 tidak dicantumkan mengenai perlindungan dan kolaborasi. Dalam MoU 2013, Amerika Serikat dan Kamboja mengeluarkan beberapa cara perlindungan antara lain:

- 1) Membentuk dan mengimplementasikan rencana untuk situs arkelogis di darat dan bawah laut yang mengimbangkan perlindungan dan kegunaan yang berkelanjutan
- 2) Mengamankan dan menginventarisasi benda-benda budaya sebagai warisan budaya nasional, termasuk benda-benda yang disimpan di institusi publik, institusi keagamaan, maupun koleksi-koleksi pribadi. Situs dokumen warisan budaya diinventarisasi dalam bentuk digital

- 3) Program pendidikan di implemetasikan diseluruh negeri untuk menginformasikan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perlindungan sumber budaya, terutama barang-barang yang berasal dari zaman besi dan perunggu.
- 4) Memperluas departemen kepolisian perlindungan warisan dan mengurangi korupsi yang merusak usaha untuk melindungi benda budaya kamboja dari penjarahan dan perdagangan transnasional.

Dalam proses berjalannya MoU oleh kedua negara ini dapat diketahui bahwa pemerintah kamboja telah berhasil menemukan beberapa benda budaya yang secara ilegal diselundupkan keluar dari wilayah kamboja. Kegiatan tersebut diperkirakan terjadi pada saat Kamboja sedang mengalami perang sipil dan terjadinya kasus pembunuhan massal di beberapa tempat dan membuat negara ini dalam kondisi yang sangat terpuruk. Daerah pedesaan pada saat itu dalam keadaan yang sangat kacau, sehingga penyelundup untuk benda-benda kebudayaan seperti patung dengan usia berabad-abad dengan mudah dicuri dan diselundupkandan. Setelah kamboja dan amerika serikat menandatangani MoU ini, benda-benda budaya milik kamboja yang telah hilang tersebutdikembalikan ke kamboja dari beberapa museum seni yang ada di Amerika Serikat. Adapun benda budaya yang kembali ialah,

Gambar 3.1 Patung *Kneeling Attendants*



Sumber : the phnom penh post “ angkorian statues to be returned”
(6 mei 2013)

Dua buah patung *Kneeling Attendants* yang selama ini berada di salah satu museum seni New York dan telah dikembalikan di Kamboja pada tahun 2011. Patung ukuran manusia menggambarkan dua pelayan istana laki-laki yang diberi nama "*Kneeling Attendants*". Dua patung tersebut selama ini menghuni Museum Seni Metropolitan Di New York, tetapi museum memutuskan untuk mengembalikan benda seni setelah menemukan bukti bahwa patung-patung tersebut diekspor secara gelap. Museum mengaku diberi patung dalam

bentukpotongan oleh penyumbang berbeda-beda antara 1987 hingga 1992.⁶⁵

Gambar 3.2 Patung *Torso Rama*



Sumber :*the Cambodia Daily* “US Museum Returns Stolen Rama Statue (29 Februari 2016)

Torso Rama atau bagian badan dari patung Ramayang sejak tahun 1986 berada di *denvert museum art*. Patung Dewa Rama yang berusia 10 abad setinggi 62 inchi dicuri di *Gua Koh Ker* pada 1970-an saat Kamboja dilanda konflik. Patung itu telah berada di Amerika Serikat kurang lebih selama 30 tahun. Patung itu tetap sangat bernilai meski tidak lagi memiliki kepala. Museum Seni Denver membeli patung itu dari sebuah galeri seni di New York. Mereka baru menyadari bahwa patung ini hasil penjarahan setelah melihat hasil penelitian terbaru yang dilakukan Museum

⁶⁵ Pikiran rakyat, *Kamboja kembali miliki dua patung abad ke- 10* dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/seni-budaya/2013/06/12/238356/kamboja-kembali-miliki-dua-patung-abad-ke-10> di akses pada tanggal 22 juli 2016 pukul 18.55 WITA.

Denver. Penelitian tersebut menunjukkan sumber asal patung ini sehingga pihak museum memutuskan untuk mengembalikannya. Pengembalian patung itu dinilai sebagai langkah baik sebagai penghargaan terhadap sejarah dan budaya.⁶⁶

Gambar 3.3 Patung Balarama, Duryodhana, dan Bhima



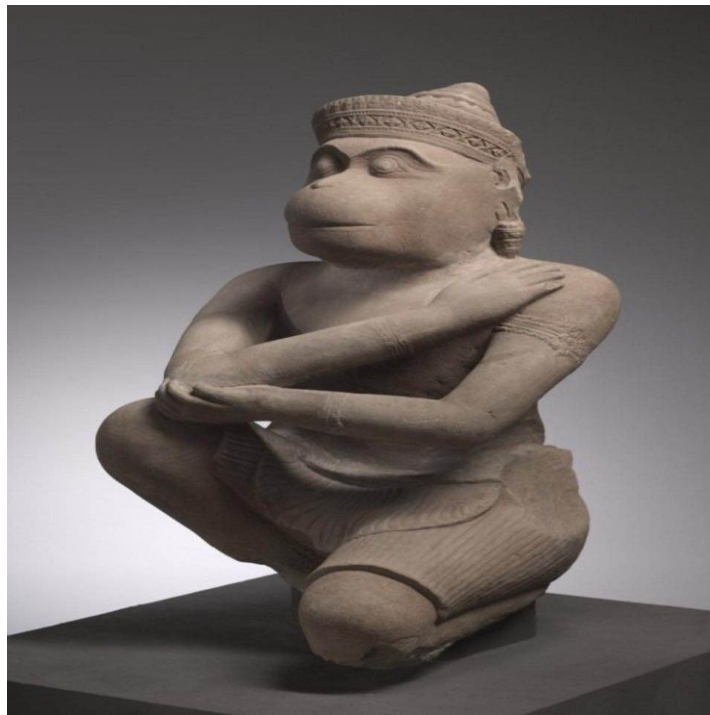
Sumber : Agence Kampoechea Press “Three Khmer Ancient Statues Return Home” (4 juni 2014)

Kamboja memiliki patung yang menjadi simbol dewa mereka yaitu Balarama, Duryodhana, dan Bhima. Ketiga patung ini diperkirakan dijarah dari kompleks kuil *Koh Ter* di provinsi Siem Reap selama pergolakan tahun 1970an. Dan museum Simon di California mengembalikan patung Bima dan kemudian disusul

⁶⁶Kompas.com, *AS Kembalikan Patung Kuno Dewa Rama yang Dicuri pada Masa Perang kepada Kamboja*
<http://internasional.kompas.com/read/2016/03/28/16000001/AS.Kembalikan.Patung.Kuno.Dewa.Rama.yang.Dicuri.pada.Masa.Perang.kepada.Kamboja> diakses pada tanggal 22 juli 2016 pukul 18.45 WITA

dengan dikembalikannya patung Baladewa dan Duryodhana oleh Balai Lelang *Sotheby dan Christie*.⁶⁷

Gambar 3.4 Patung Hanuman



Sumber : Nord On Art “*Cleveland Museums Returns Looted Cambodian Sculpture* (11 Mei 2015)

Sejak 1982, Patung Hanoman menghuni *Cleveland Museum of Art*, Patung Hanoman dari *Koh Ker* berasal dari era pra-Angkorian. Patung Hanoman dijarah dari Komplek Candi Koh Ker sama halnya dengan patung patung lain, hanoman di jarah pada saat kamboja sedang mengalami konflik, ketika Kamboja terjerumus kekacauan politik. Patung itu tidak utuh lagi. Kakinya

⁶⁷Patung kuno kamboja dikembalikan <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/12/patung-kamboja-akan-dikembalikan-sotheby> diakses pada tanggal 22 juli 2016 pukul 17.56 WITA.

terpotong saat diambil paksa para pencuri. Pada tahun 2014 patung ini juga akhirnya dikembalikan ke kamboja.⁶⁸

Berdasarkan beberapa sumber yang memberitakan dikembalikannya beberapa patung oleh museum-museum yang ada di amerika, dapat diketahui bahwa sejak MoU pertama kali ditanda tangani yaitu pada tahun 2003 di Pnom phen, kerjasama ini telah menghasilkan kemajuan dengan dikembailkannya beberapa benda benda kebudayaan milik Kamboja, dimana hal ini merupakan tujuan awal yang ingin dicapai di awal MoU ini dibuat. Walaupun masih banyak warisan budaya Kamboja yang tersebar secara ilegal di beberapa negara tapi setelah dipulangkannya patung-patung tersebut maka masyarakat dan pemerintah kamboja akan terus berusaha. Adapun untuk Amerika Serikat yang telah menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa negara ini tidak hanya menjadi negara anggota UNESCO tetapi menjadi negara anggota yang aktif dan berperan dalam melestarikan warisan budaya dunia.

Hubungan bilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Kamboja menjelaskan bahwa kepentingan nasional kedua negara ini jelas berbeda tetapi dengan membuat MoU yang berisi poin-poin yang menguntungkan kedua pihak maka kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh kedua negara bisa diperoleh. Kerjasama yang berbasis kebudayaan ini juga menunjukkan bahwa kebudayaan penting untu dijaga

⁶⁸Koran sindo, *AS kembalikan patung curian ke kamboja* dalam <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=20&date=2016-03-29> diakses pada tanggal 22 juli 2016 pukul 19.06 WITA.

karena Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dibuat kembali jika dicuri dan dirusak jadi semua benda-benda kebudayaan harus dilestarikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepentingan Amerika Serikat dan Kamboja berbeda, Amerika Serikat melakukan kerjasama ini untuk Menjaga hubungan luar negerinya dengan negara-negara yang mengalami kejahatan terhadap benda budaya. Kemudian amerika serikat juga Mengembalikan benda-benda budaya yang diselundupkan karena amerika serikat merupakan negara tujuan dari kegiatan tersebut. Selain itu Amerika Serikat juga ingin memperlihatkan pada masyarakat internasional bahwa negara ini merupakan anggota UNESCO yang berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan warisan dunia. Adapun Kamboja melakukan kerjasama ini sebagai negara yang dalam hal ini merupakan negara asal dari benda-benda budaya yang diselundupkan ingin warisan budaya yang merupakan simbol dan kepercayaan bagi masyarakatnya untuk dikembalikan. Kemudian dengan melakukan kerjasama ini maka pemerintah kamboja telah melakukan usaha untuk melestarikan warisan budayanya yang merupakan bagian dari upaya menyeluruh terhadap strategi berkelanjutan pemerintah untuk melindungi sumber daya budaya. Selain itu pemerintah Kerajaan Kamboja akan berusaha untuk memperkuat kerjasama regional, terutama dengan negara-negara tetangga, untuk melakukan usaha perlindungan warisan budaya.

2. Setelah kamboja dan amerika serikat menandatangani MoU ini, benda-benda budaya milik kamboja yang telah hilang tersebut dikembalikan ke kamboja dari beberapa museum seni yang ada di Amerika Serikat. Adapun benda budaya yang kembali ialah Dua buah patung *Kneeling Attendants*, *Torso Rama*, patung yang menjadi simbol dewa mereka yaitu Baladewa, Duryodhana, dan Bima, Patung Hanoman. Amerika Serikat dan Kamboja mengeluarkan beberapa cara perlindungan antara lain Membentuk dan mengimplementasikan rencana untuk situs arkelogis di darat dan bawah laut yang mengimbangkan perlindungan dan kegunaan yang berkelanjutan, Program pendidikan diimplementasikan diseluruh negeri untuk menginformasikan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perlindungan sumber budaya, terutama barang-barang yang berasal dari zaman besi dan perunggu serta memperluas departemen kepolisian perlindungan warisan dan mengurangi korupsi yang merusak usaha untuk melindungi benda budaya kamboja dari penjarahan dan perdagangan transnasional.

B. Saran

1. Kerjasama yang dilakukan Amerika Serikat dan Kamboja dalam hal ini yang berbentuk *momerandum of understanding* untuk tetap dijalankan dan diperpanjang pada waktunya karena masih banyaknya benda benda kebudayaan Kamboja yang berada dalam kondisi berbahaya. Pemerintah Kamboja harus tetap waspada karena akan selalu ada pihak pihak yang ingin mengambil keuntungan sehingga diperlukan perluasan informasi pengetahuan pada masyarakat lokal mengenai pentingnya melestarikan warisan budaya yang sudah menjadi simbol dan identitas kamboja sebagai sebuah negara.
2. Selain memproteksi jalur ekspor, pemerintah kamboja juga harus melakukan lebih banyak kerjasama bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan dari penyelundupan benda benda budaya, seperti yang Kamboja lakukan dengan Amerika Serikat. Sehingga jalur jual beli benda budaya semakin kecil dan usaha untuk mengembalikan warisan budaya kamboja bisa dipermudah dengan adanya kerjasama bilateral seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Banyu, Perwita, AA & Yani, Yanyan M, 2005 *Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Holsti, K.J, terjemahan Elfin Sudrajat dkk. 1987. *Politik Internasional : Kerangka Analisa*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2009. *Pengantar studi hubungan internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jeanette, Greenfield, 2013. *The Return of Cultural Treasure third edition*. England: Cambridge University.
- Jemadu, Aleksius. 2014. *Politik Global:Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jenks, Chris. 2013. *Culture Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Kila, Joris. 2013. *Cultural Heritage in the Crosshairs, Protecting Cultural Property During Conflict*. Leiden
- Koentjaraningrat, 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta :PT.Gramedia.
- Kusumatmaja, Mochtar dan Agoes, Etty R, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: Bina Cipta.
- Proot, Lyndel V dan J'Okefee, Patrick. 1988. *Handbook of national regulations concerning the export of cultural property*
- Rachmawaty, Iva. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soelaeman, M. Munandar. 2001. *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Teilmann, Katherine dan Klein, Malcolm. 1980. *Handbook of Criminal Justice Evaluation*. Beverly Hills London
- Wahab, Abdul Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yusuf, Sudri. 1989. *Hubungan Internasional & Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

JURNAL

- Frank J, Marine. 1999. Threats Posed by Transnational Crimes and Organized Crime Groups; United States Responses to the Threats Posed by Transnational Crime and Organized Crime Groups (From UNAFEI Resource Material Series No. 54, P 25-53, 1999 -- See NCJ-190077)
- Ning, kang. 2009. "puritanisme and its impact upon american values" Review of European Studies, Vol. 1 Issue 2 desember 2009.
- Suparlan, Parsudi. 1999, "*Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme*". Jurnal Studi Amerika, vol.5 Agustus, hal. 35-42.

INTERNET

- Amanda briney *Geography of the United States of America* diunggah pada tanggal 12 maret 2010 <http://geography.about.com/od/unitedstatesofamerica/a/unitedstatesgeography.htm> diakses pada tanggal 30 juni 2016.
- Cambodian genocide diunggah pada tahun 2015 dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zUVbvO2GiOUJ:worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/cambodian-genocide+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=idhttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zUVbvO2GiOUJ:worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/cambodian-genocide+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 26 juni 2016 pukul 08.00 WITA.
- Dr.Melody Rod-ar *Angkor Wat* diunggah pada tahun 2012 dalam <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eqpJjUtwczcJ:https://www.khanacademy.org/humanities/art-asia/southeast-asia/mainland-se-asia/a/angkor-wat+&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 21 juli 2016 pukul 13.16 WITA.

Frank J. Marine, *The Threats Posed By Transnational Crimes And Organized Crime Groups*. Dalam

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rudYMI3p-EJ:www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No54/No54_06VE_Marine.pdf+&cd=18&hl=en&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 5 mei 2016 pukul 15.35 WITA.

ICOM, *Red List of Cambodian Antiquities at Risk* 9 februari 2010 dalam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sY41OtNbcWIJ:archives.icom.museum/press/100209_Cambodian_Red_List_Press_file_EN.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 20 maret 2016

Judit Trunkos, *What Is Soft Power Capability And How Does It Impact Foreign Policy?* Diunggah pada tanggal 06 januari 2013 Dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?Q=cache:2yuhay1peowj:www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2013-acdusa/What-Is-Soft-Power-Capability-And-How-Does-It-Impact-Foreign-Policy--Judit-Trunkos.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id> Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2016 Pukul 16.20 WITA.

Konvensi tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Sengketa Bersenjata Den Haag, 14 Mei 1954 <http://www.frrolawoffice.com/wp-content/uploads/2010/09/KONVBE.pdf> diakses pada hari Kamis 17 Maret 2016.

Koran sindo, *AS kembalikan patung curian ke kamboja* dalam <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=20&date=2016-03-29> diakses pada tanggal 22 juli 2016 pukul 19.06 WITA.

Kompas.com, *AS Kembalikan Patung Kuno Dewa Rama yang Dicuri pada Masa Perang kepada Kamboja* <http://internasional.kompas.com/read/2016/03/28/16000001/AS.Kembalikan.Patung.Kuno.Dewa.Rama.yang.Dicuri.pada.Masa.Perang.kepada.Kamboja> diakses pada tanggal 22 juli 2016 pukul 18.45 WITA

Leonard C. Overton, *About Cambodia* diunggah tanggal 5 juni 2016 dalam <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WXd6OBhFJiYJ:https://www.britannica.com/place/Cambodia+&cd=16&hl=en&ct=clnk&gl=id> Diakses Pada Tanggal 15 juni 2016 Pukul 14.20 WITA.

Lon Nol Regime - 1970-1975 dalam diunggah pada tanggal 20 april 2013 <http://www.globalsecurity.org/military/world/cambodia/history-lon-nol.htm> di akses pada diakses 18 juli 2016 Pukul 20.39 WITA.

Meeting the Challenge of Transnational Crime : Case Crime of Cultural Art Property <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/jr000244b.pdf> diakses pada hari Rabu 16 Maret 2016 pada pukul 17.00 WITA.

Ning kang, *Puritanism and Its Impact upon American Values* desember 2009
<http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/viewFile/4585/3924>
diakses pada tanggal 15 juli 2016.

Pikiran rakyat, *Kamboja kembali miliki dua patung abad ke- 10* dalam
<http://www.pikiran-rakyat.com/seni-budaya/2013/06/12/238356/kamboja-kembali-miliki-dua-patung-abad-ke-10> di akses pada tanggal tanggal 22 juli 2016 pukul 18.55 WITA.

Patung kuno kamboja dikembalikan
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/12/patung-kamboja-akan-dikembalikan-sotheby> diakses pada tanggal 22 juli 2016 pukul 17.56 WITA.

Process and Purpose<http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/process-and-purpose> diakses pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.07 WITA.

Preah vihear dispute cambodia- thailand diunggah pada tanggal 1 januari 2011
<http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/print/features/2011/01/01/feature-16> diakses pada hari Rabu 16Maret 2015.

Phomphen Post, “*Return Cambodia’s Treasures, Repair Our People’s Souls*”
diunggah 26 Mei 2014 dalam <http://www.phnompenhpost.com/analysis-and-op-ed/return-cambodia> diakses 20 Maret 2016.

Pol pot: the early years diunggah pada tanggal 05 juni 2012 dalam
<http://www.history.com/topics/pol-pot> diakses 13 juni 2016 pukul 11.05 WITA.

Ralf Emmers, *The Securitization Of Transnational Crime In ASEAN 2002* dalam
[Https://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:4wfe-2f9scj:Https://Www.Rsis.Edu.Sg/Wp-Content/Uploads/Rsis-Pubs/WP39.Pdf+&Cd=4&Hl=En&Ct=Clnk&Gl=Id](https://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:4wfe-2f9scj:Https://Www.Rsis.Edu.Sg/Wp-Content/Uploads/Rsis-Pubs/WP39.Pdf+&Cd=4&Hl=En&Ct=Clnk&Gl=Id)Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2016 Pukul 16.20 WITA

Richard Rosecrance, *introduction : the Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World*, Chapters 1 & 2 (pp. 16-43) tahun 2000 dalam
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xWx7RtxnaNoJ:www.olivialau.org/ir/archive/ros4.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id>Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2016 Pukul 16.30 WITA

Tangible Cultural Heritage<http://www.unesco.org/new/en/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/> diakses pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.

Transnational Crime<http://osetc.gov.ph/crimes.php> diakses pada hari Kamis 17 Maret 2016. Pada pukul 20.05 WITA.

UNESCO *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954* dalam http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html diakses pada hari Rabu 16 Maret 2016 pada pukul 17.40 WITA.

United Nations Office on Drugs and Crime, Emerging Crimes : Organized Crime <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/emerging-crimes.html> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada pukul 16.30 WITA

U.S-Cambodia Cultural Property Agreement.<http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/bilateral-agreements/cambodia/us-cambodia> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pada pukul 19.50 WITA.

UNESCO : *World Conference on Cultural Policies* diunggah 2010 dalam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VibXnVKObzIJ:www.unesco.org/archives/new2010/en/history_of_unesco.html+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2016 Pukul 16.20 WITA.

United Nations Office On Drugs And Crime, *united nations convention against Transnational organized crime And the protocols 2004* dalam https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yNviRHJrrCsJ:https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 5 mei 2016 pukul 16.05 WITA

UNESCO : *World Conference on Cultural Policies* diunggah tahun 2010 dalam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VibXnVKObzIJ:www.unesco.org/archives/new2010/en/history_of_unesco.html+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2016 Pukul 16.20 WITA.

U.S-Cambodia Cultural Property Agreement.<http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/bilateral-agreements/cambodia/us-cambodia> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.

U.S. SENATE REPORT, 97-564 *Implementing Legislation For The Convention On The Means Of Prohibiting And Preventing The Illicit Import, Export, And Transfer Of Ownership Of Cultural Property* dalam

<https://eca.state.gov/files/bureau/97-564.pdf> diakses pada tanggal 23 juli
2016 pukul 16.00 WITA

CULTURAL PROPERTY

**Memorandum of Understanding
Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and CAMBODIA**

Signed at Phnom Penh September 19, 2003

and

Memorandum of Understanding Amending and
Extending the Memorandum of Understanding

Effected by Exchange of Notes at
Phnom Penh August 14 and 26, 2008



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . . the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

CAMBODIA

Cultural Property

*Memorandum of understanding signed at
Phnom Penh September 19, 2003;
Entered into force September 19, 2003.
And memorandum of understanding amending and
extending the memorandum of understanding.
Effected by exchange of notes at Phnom Penh
August 14 and 26, 2008;
Entered into force August 26, 2008.*

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
CONCERNING THE IMPOSITION OF IMPORT RESTRICTIONS ON
KHMER ARCHAEOLOGICAL MATERIAL**

The Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Cambodia;

Acting pursuant to the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, to which both countries are States Party; and

Desiring to reduce the incentive for pillage of certain categories of irreplaceable archaeological material representing the Khmer culture of Cambodia from approximately the 6th century through the 16th century A.D., and including objects comprised of stone, metal (mainly gold, silver, and bronze), and ceramic;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

A. The Government of the United States of America, in accordance with its legislation entitled the Convention on Cultural Property Implementation Act, shall restrict the importation into the United States of certain categories of Khmer archaeological material, identified on a list to be promulgated by the United States Government (hereinafter known as the "Designated List"), unless the Government of the Kingdom of Cambodia issues a certification or other documentation which certifies that such exportation was not in violation of its laws.

B. The Government of the United States of America shall offer for return to the Government of the Kingdom of Cambodia any material on the Designated List forfeited to the Government of the United States of America.

C. Such import restrictions shall become effective on the date the Designated List is published in the U.S. Federal Register, the official United States Government publication providing fair public notice. Emergency import restrictions covering Khmer stone sculpture, first promulgated by regulation on December 2, 1999, shall remain in effect.

ARTICLE II

A. The Government of the Kingdom of Cambodia shall use its best efforts to permit the exchange of its archaeological material under circumstances in which such exchange does not jeopardize its cultural patrimony but allows public access for educational, cultural and scientific purposes and study abroad.

B. Representatives of the Government of the United States of America shall participate in joint efforts with representatives of the Government of the Kingdom of Cambodia to publicize this Memorandum of Understanding and the reasons for it.

C. The Government of the United States of America shall use its best efforts to facilitate technical assistance in cultural resource management and security to the Government of the Kingdom of Cambodia, as appropriate under existing programs in the public and/or private sectors.

D. Both Governments shall seek to encourage academic institutions, non-governmental institutions, and other private organizations to cooperate in the interchange of knowledge and information about the cultural patrimony of the

Kingdom of Cambodia, and to collaborate in the preservation and protection of such cultural patrimony through appropriate technical assistance, training and resources.

E. The Government of the Kingdom of Cambodia shall seek to develop and promote professional training programs for archaeologists and museum staff and public institution administrators responsible for cultural patrimony, and to enhance the capabilities of the National Museum of Cambodia to care for and exhibit aspects of its rich cultural heritage.

F. The Government of the Kingdom of Cambodia shall continue to use its best efforts to implement a comprehensive management plan for Angkor and to develop a prioritized management plan for sites and monuments outside of Angkor focusing on sustainable development.

G. The Government of the Kingdom of Cambodia shall use its best efforts to develop educational programs among local populations throughout the country as part of an overall effort toward sustainable strategies for protecting cultural resources.

H. The Government of the Kingdom of Cambodia shall use its best efforts in restricting the activities of antiquities dealers and collectors within its borders, in making export controls more effective, and in seeking the cooperation of other importing countries in curbing illicit trade in cultural artifacts originating in Cambodia.

I. The Government of the Kingdom of Cambodia shall use its best efforts to address issues of corruption that undermine efforts to protect and develop Cambodian cultural patrimony in a sustainable fashion.

J. In order for United States import restrictions to be maximally successful in thwarting pillage, the Government of the Kingdom of Cambodia shall endeavor to strengthen regional cooperation, especially with immediately neighboring states, for the protection of the cultural patrimony of the region, recognizing that often, present-day political boundaries and cultural boundaries do not coincide.

ARTICLE III

The obligations of both Governments and the activities carried out under this Memorandum of Understanding shall be subject to the laws and regulations of each Government, as applicable, including the availability of funds.

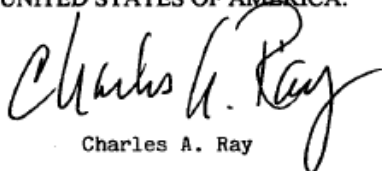
ARTICLE IV

- A. This Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature. It shall remain in force for a period of five years.
- B. This Memorandum of Understanding may be amended or extended through an exchange of diplomatic notes.
- C. The effectiveness of this Memorandum of Understanding shall be subject to review in order to determine, before the expiration of the five-year period of this Memorandum of Understanding, whether it should be extended.
- D. Once published in the Federal Register, the Designated List referred to in Article I A shall supersede that published on December 2, 1999.

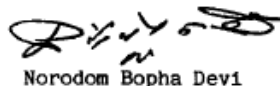
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

DONE at Phnom Penh, in duplicate, this 19th day of September, 2003, in the English and Khmer languages, both texts being equally authentic. In the case of any difference in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:


Charles A. Ray

FOR THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF CAMBODIA:


Norodom Bopha Devi

អនុស្សាវរីយ៍នៃការរក្សាអរិយធម៌

រចនា

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

និង

រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ស្តីអំពី

ការដាក់កំរិតហាមឃាត់ការនាំចូលវត្ថុបុរាណខ្មែរ

ដោយអនុលោមតាមអនុសញ្ញារបស់អង្គការយូណេស្កូ (UNESCO) ឆ្នាំ១៩៧០ ស្តីពីមធ្យោបាយ
ដែលត្រូវហាមឃាត់ និងការទប់ស្កាត់ការនាំចេញ នាំចូលខុសច្បាប់ និងការផ្ទេរម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃសម្បត្តិវប្បធម៌
របស់ប្រទេសទាំងពីរដែលជារដ្ឋភាគី ; ហើយ

ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយដល់ការជួយជម្រុញឱ្យមានការលួចប្លន់ប្រភេទវត្ថុបុរាណមួយចំនួន ដែល
មិនអាចមានអ្វីជំនួសបាន នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី១៦ រហូតដល់ទី១៦ ដែលតំណាងឱ្យវប្បធម៌ជាតិខ្មែរ របស់
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមមានវត្ថុបុរាណអំពីថ្ម លោហធាតុ (ជាពិសេស មាស ប្រាក់ និងសិរិទ្ធ)
ហើយនិងកុណលភាជន៍;

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក និង រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បានក្លាយជាក្រុមប្រឹក្សាដូចតទៅ៖

មាត្រា ១

គ. ស្របតាមច្បាប់របស់ខ្លួន ដែលមានចំណងជើងថា “អនុសញ្ញាស្តីអំពីច្បាប់អនុវត្តន៍លើវិស័យសម្បត្តិវប្បធម៌” សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់កំរិតហាមប្រាមការនាំចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិក នូវប្រភេទវត្ថុបុរាណខ្មែរមួយចំនួនដែលបានបញ្ជាក់កំរិតភាគក្នុងបញ្ជីដែលនឹងត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈដោយ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក (ក្នុងអនុស្សរណៈនេះហៅថា “**បញ្ជីគំនិតប្រភេទវត្ថុបុរាណ**”) លើកលែងតែរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញលិខិត ឬឯកសារដែលបញ្ជាក់ថា ការនាំចេញនោះមិនរំលោភដល់ច្បាប់របស់ខ្លួនទេ ។

ខ. រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងឡាយណាដែលខ្លួនរឹបអូសបាន ដែលមានឈ្មោះចុះក្នុងបញ្ជីគំនិតប្រភេទវត្ថុបុរាណ ជូនរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញ ។

គ. ការហាមឃាត់ការនាំចូល មានប្រសិទ្ធភាពនៅពេល “**បញ្ជីគំនិតប្រភេទវត្ថុបុរាណ**” ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបញ្ជីសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលសំរាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ ។ ការហាមឃាត់ការនាំចូលជាបន្ទាន់ទាក់ទងនឹងរូបចម្លាក់ខ្មែរ បានប្រកាសជាច្បាប់ជូនសាធារណៈលើកដំបូង ដោយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩ ហើយច្បាប់នេះ នៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែល ។

មាត្រា ២

គ. រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាព ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្តូរគ្នានូវវត្ថុបុរាណ ក្នុងករណីដែលការប្តូរគ្នានោះមិនបង្កឱ្យអន្តរាយដល់បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌របស់ខ្លួន ហើយការប្តូរគ្នានោះក៏ត្រូវអនុញ្ញាតអោយសាធារណៈមានសិទ្ធិចូលរួមដឹង និងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្នែកអប់រំវប្បធម៌ និងវិទ្យាសាស្ត្រ ព្រមទាំងផ្នែកសិក្សា ស្រាវជ្រាវនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ ។

ខ. តំណាងទាំងឡាយនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវសហការនិងប្រឹងប្រែងរួមជាមួយតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ និងគោលបំណងរបស់វា ។

គ. រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រឹងប្រែងឱ្យអស់លទ្ធភាព ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរកជំនួយបច្ចេកទេសជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់គ្រប់គ្រង សម្បត្តិវប្បធម៌ និងសន្តិសុខឱ្យបានសមស្របតាមកម្មវិធី ដែលមានស្រាប់ទាំងនៅក្នុងផ្នែកសាធារណៈ និង ឯកជន ។

២២. រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរត្រូវរកវិធានការ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នអប់រំ ស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការឯកជនផ្សេងៗទៀត ឱ្យសហការគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមក នូវចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន អំពីបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយឱ្យសហការគ្នាក្នុងការថែរក្សា និងការការពារ បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ទាំងនេះ តាមរយៈជំនួយបច្ចេកទេស ការបណ្តុះបណ្តាល និងធនធានដ៏សមស្រប ។

២៣. រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវស្វែងរកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងលើកស្ទួយនូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដល់បុរាណវិទូ បុគ្គលិកសារៈមន្ទីរវត្ថុបុរាណ ព្រមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្ថាប័នសាធារណៈ ដែលទទួលខុសត្រូវការងារបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនៃសារៈមន្ទីរជាតិកម្ពុជាបន្ថែមទៀត ដើម្បីថែរក្សា និងលាតត្រដាងអោយឃើញនូវទិដ្ឋភាពជាតិក្នុងវិស័យដ៏សំបូរបែបរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ។

២៤. រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឱ្យអស់លទ្ធភាព ដើម្បីអនុវត្តនូវផែនការគ្រប់គ្រងតំបន់អង្គរវត្តអោយបានទូលំទូលាយ និងដាក់ចេញនូវផែនការជាអាទិភាពមួយ សំរាប់ទីកន្លែងនានា និងប្រាសាទផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្រៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្ត ដោយផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ។

២៥. រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់លទ្ធភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអប់រំ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទនៅទូទាំងប្រទេស ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងស្រុងឆ្ពោះទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយចីរភាព សម្រាប់ការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ ។

២៦. រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការដាក់កម្រិតហាមប្រាម ដល់សកម្មភាពនានា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរវត្ថុបុរាណ និងអ្នកប្រមូលវត្ថុបុរាណឱ្យនៅក្នុងព្រំដែនរបស់គេ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញ ហើយនិងការស្វែងរកឱ្យមានអោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមប្រទេសដែលនាំចូលវត្ថុបុរាណ វិធីតែមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរខុសច្បាប់នូវវត្ថុបុរាណដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជា ។

២៧. រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវប្រឹងប្រែងឱ្យអស់លទ្ធភាព ដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាពុករលួយ ដែលអាចបំផ្លាញនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការការពារ និងអភិវឌ្ឍបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌កម្ពុជា តាមវិធីមួយប្រកបដោយចីរភាព ។

ឃ្លៀងឃ្លាតអោយសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តការដាក់កម្រិតចំពោះការនាំចូល ឱ្យប្រកបដោយជោគជ័យ ជាអតិបរមាសម្រាប់កំណត់ការលូតលាស់វត្ថុបុរាណ រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវព្យាយាមពង្រឹង នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ ជាពិសេសជាមួយបណ្តាប្រទេសជិតខាងដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នា ដើម្បីការពារ បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌របស់តំបន់នោះ ដោយទទួលស្គាល់ថា ជាញឹកញាប់នាបច្ចុប្បន្នកាលនេះ ព្រំដែននយោបាយ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន និងព្រំដែនវប្បធម៌មិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេ ។

មាត្រា ៣

កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ និងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលត្រូវបានអនុវត្តក្រោមអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់នេះ ត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់និងវិធានការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗ ដែល អាច អនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តបាន ហើយត្រូវអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពនៃធនធានថវិការដ្ឋដែរ ។

មាត្រា ៤

ក. អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់នេះ ត្រូវចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។
អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់នេះ ត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពសំរាប់រយៈពេលប្រាំ (៥) ឆ្នាំ ។

ខ. អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់នេះ អាចធ្វើវិសោធនកម្ម ឬពន្យារពេលបាន តាមរយៈនៃការផ្លាស់ប្តូរ កំណត់ទូទៅវិញទៅមក ។

គ. ប្រសិទ្ធភាពនៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់នេះ អាចត្រូវយកមកពិនិត្យឡើងវិញបាន ក្នុង គោលបំណងដើម្បីសម្រេចថា តើគួរពន្យារពេលសំរាប់អនុវត្តជាបន្តទៅទៀត មុនពេលដែលអនុស្សរណៈនេះ ត្រូវផុតសុពលភាពក្នុងអំឡុងពេលប្រាំ (៥) ឆ្នាំ ។

ឃ. នៅពេលដែលអនុស្សរណៈនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីសហព័ន្ធ (Federal Register) បញ្ជី **កំណត់ប្រភេទវត្ថុបុរាណ** (Designated List) ដែលមានចែងក្នុងមាត្រាទី១ (ក) និងត្រូវជំនួសបញ្ជី កំណត់ប្រភេទវត្ថុបុរាណ ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩ ។

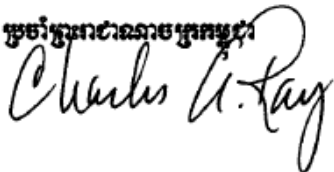
ជំនាញ អ្នកចុះហត្ថលេខាខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានអនុញ្ញាតធ្វើជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗ
ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនេះ ។

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៣ ចំនួនពីរច្បាប់ ជាភាសា អង់គ្លេស
និង ខ្មែរ ដែលអត្ថបទទាំងពីរភាសានេះ មានតម្លៃស្មើគ្នា ។ ក្នុងករណីមានការបកស្រាយមិនស្របគ្នា
អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសយកមកធ្វើជាសំអាង ។

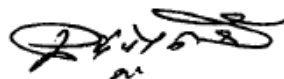
តំណាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ឆាល អារារ៉ៃ អ៊ី
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រចាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ និង
វិស័យយុត្តិធម៌



No: 594

The Embassy of the United States of America refers the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Government of the Kingdom of Cambodia to the Memorandum of Understanding Between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Cambodia Concerning the Imposition of Import Restrictions on Khmer Archaeological Material signed at Phnom Penh September 19, 2003 (hereinafter referred to as "the MOU"). The Embassy, on behalf of the Government of the United States of America, proposes that, pursuant to Article IV. B of the MOU, the MOU be extended for an additional five-year period.

The Embassy further proposes that, pursuant to Article IV. B of the MOU, the MOU be amended by replacing Article II with the attached revised Article II. The Embassy also proposes several changes in the wording of the MOU, including the title. A list of the proposed changes is also attached.

If the foregoing proposals are acceptable to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, the Embassy proposes that this note, including the attached revised Article II, and the Ministry's affirmative note in reply, shall constitute an agreement to amend and extend the MOU, which shall enter into force on the date of the Ministry's note in reply and shall take effect on September 19, 2008.

DIPLOMATIC NOTE

Embassy of the United States of America

Phnom Penh, August 14, 2008.

Attachments:

As stated.

cc: Ministry for Foreign Affairs



United States of America-Kingdom of Cambodia Memorandum of Understanding
Extension 2008
Revised Article II

- A. The Government of the Kingdom of Cambodia shall seek to expand the exchange of its archaeological material with U.S. institutions under circumstances that do not jeopardize its cultural patrimony, such as for temporary loans for exhibitions, including long-term loans whenever appropriate, and for other cultural, educational, and scientific purposes.
- B. Representatives of the Governments of the United States of America and the Kingdom of Cambodia shall participate in efforts to publicize this Memorandum of Understanding and the reasons for it, particularly as they relate to the Bronze and Iron Ages.
- C. The Government of the United States of America shall continue to use its best efforts to facilitate technical assistance in cultural resource management and security to the Government of the Kingdom of Cambodia, as appropriate under available programs in the public and/or private sectors.
- D. Both Governments shall seek to encourage national and international institutions to promote archaeological research in Cambodia, and to further the interchange of knowledge about the archaeological heritage representing the Bronze Age through the Post-Angkorian Period.
- E. The Government of the Kingdom of Cambodia shall continue to develop and promote professional training programs for archaeologists, museum staff, and institutional administrators responsible for cultural patrimony, to enhance the capabilities of the museums of Cambodia to care for and present their rich cultural heritage.
- F. The Government of the Kingdom of Cambodia shall continue to use its best efforts to:
- create and implement management plans for archaeological sites that balance protection with sustainable use;
 - secure museum collections and document/inventory standing archaeological remains;
 - implement educational programs throughout the country to inform and engage its citizens in the protection of cultural resources, particularly those of the Bronze and Iron Ages;
 - expand the Department of Patrimony Protection Police; and
 - reduce corruption that undermines efforts to protect Cambodian cultural patrimony from pillage and illicit trafficking.
- G. The Government of the Kingdom of Cambodia shall endeavor to enhance its collaborative efforts with the Government of the Kingdom of Thailand to control the illicit movement of Cambodian archaeological materials across their shared border.

H. The Government of the Kingdom of Cambodia shall report regularly to the Embassy of the United States of America on its efforts to safeguard its cultural patrimony from pillage.

Amendments to the Memorandum of Understanding (2008)

TITLE

Current – “Memorandum of Understanding Between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Cambodia Concerning the Imposition of Import Restrictions on Khmer Archaeological Material”

Delete – “...Khmer Archaeological Material”

Insert – “...*Archaeological Material from Cambodia from the Bronze Age through the Khmer Era*”

Amended Title – – “Memorandum of Understanding Between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Cambodia Concerning the Imposition of Import Restrictions on Archaeological Material from Cambodia from the Bronze Age through the Khmer Era”

PREAMBLE

Current – “Desiring to reduce the incentive for pillage of certain categories of irreplaceable archaeological material representing the Khmer culture of Cambodia from approximately the 6th century through the 16th century A.D., and including objects comprised of stone, metal (mainly bronze), and ceramic;”

Delete – “the Khmer culture of Cambodia from approximately the 6th century through the 16th century A.D., and including objects comprised of stone, metal (mainly bronze), and ceramic;”

Insert – “a continuum of culture from the Bronze Age through the Khmer era;”

Amended paragraph – “Desiring to reduce the incentive for pillage of certain categories of irreplaceable archaeological material representing a continuum of culture from the Bronze Age through the Khmer era;”

ARTICLE I

Current – “The Government of the United States of America, in accordance with its legislation entitled the Convention on Cultural Property Implementation Act, shall restrict the importation into the United States of certain categories of Khmer archaeological material, identified on a list to be promulgated by the United States Government (hereinafter known as the "Designated List"), unless the Government of the Kingdom of Cambodia issues a certification or other documentation which certifies that such exportation was not in violation of its laws.”

Delete – “Khmer”

No addition

Amended Article – “The Government of the United States of America, in accordance with its legislation entitled the Convention on Cultural Property Implementation Act, shall restrict the importation into the United States of certain categories of archaeological material, identified on a list to be promulgated by the United States Government (hereinafter known as the "Designated List"), unless the Government of the Kingdom of Cambodia issues a certification or other documentation which certifies that such exportation was not in violation of its laws.”

ARTICLE II

Substitute new Article II (attached)

KINGDOM OF CAMBODIA

Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation



NATION – RELIGION – KING

N^o 1346 MFA-IC/LCI

The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation presents its compliments to the Embassy of the United States of America in Phnom Penh and has the honor to acknowledge receipt of the Embassy's Note No.594 dated 14 August 2008 regarding the Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the United States of America concerning the Imposition of Import Restrictions on Khmer Archaeological Materials into the United States of America signed on 19 September 2003 at Phnom Penh.

*In this regard, the Ministry would like to inform the Embassy that the Government of the Kingdom of Cambodia **accepts the foregoing proposal** by the United States of America **to amend** the title, the Preamble, the Article 1 and the substitute new Article 2 of the MOU and **to extend** for the additional period of five years of the above-mentioned MOU.*

The Ministry considers that the Embassy's Note and the present Ministry's Note shall constitute an agreement to amend and extend the said MOU, which shall enter into force on the date of the Ministry's note in reply and shall take effect on 19 September 2008.

The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation avails itself of this opportunity to renew to the Embassy the assurances of its highest consideration

Phnom Penh, 30 August 2008



Embassy of the United States of America
Phnom Penh

Address : N^o 3, Samdech Hun Sen Street, Sangkat Tonle Basac, Khan Chamcarmon,
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Tel : (855) 23 214 441 , 216 122
Fax : (855) 23 216 144 , 216 141
Email : mfaicasean@online.com.kh